

BAB II
EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

2.1 KONDISI UMUM DAERAH
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis



Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, luas wilayah Provinsi Banten adalah 8.651,20 km² yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, Pemerintah Provinsi Banten melakukan pemekaran wilayah dengan dibentuknya Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota, sesuai rincian pada Tabel 2.1.

Secara geografis, letak Provinsi Banten berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Desa/Kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2010

Kabupaten/Kota		Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten					
1	Pandeglang	35	324	13	337
2	Lebak	28	340	5	345
3	Tangerang	29	246	28	274
4	Serang	28	320	-	320
Kota					
1	Tangerang	13	-	104	104
2	Cilegon	8	-	43	43
3	Serang	6	30	36	66
4	Tangerang Selatan	7	5	49	54
Provinsi Banten		154	1265	278	1543

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Tabel 2.2
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 1961-2010

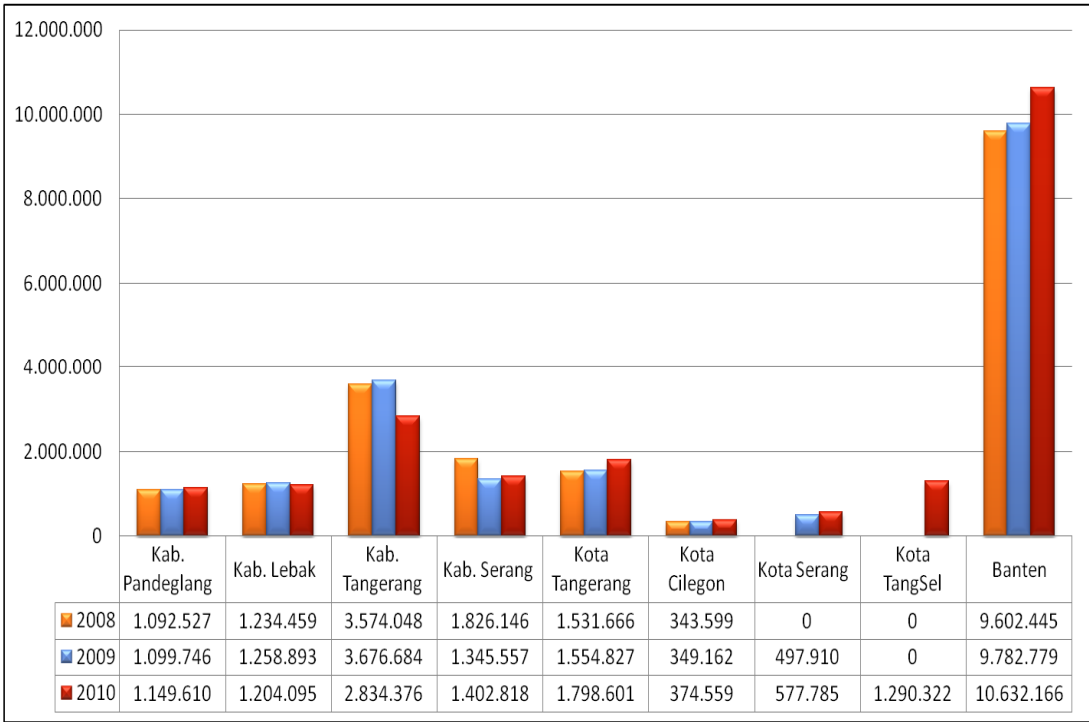
KABUPATEN/ KOTA	1961	1971	1980	1990	2000	2009	2010
Kabupaten							
1. Pandeglang	440,213	572.628	694,759	858,435	1,011,788	1.099.746	1,149,610
2. Lebak	427,802	546,364	682,868	873,646	1,030,040	1.258.893	1,204,095
3. Tangerang*	643,647	789,870	1,131,199	1,843,755	2,781,428	3.676.684	2,834,376
4. Serang**	648,115	766,410	968,358	1,244,755	1,652,763	1.345.557	1,402,818
Kota							
5. Tangerang	206,743	276,825	397,825	921,848	1,325,854	1.554.827	1,798,601
6. Cilegon	72,054	93,057	140,828	226,083	294,936	349.162	374,559
7. Serang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	497.910	557,785
8. Tangerang Selatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,290,322
Banten	2,258,574	3,045,154	4,015,837	5,967,907	8,096,809	9.782.779	10,632,166

Sumber : BPS Provinsi Banten, Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010

*) termasuk Kota Tangerang Selatan (kecuali Tahun 2010)

**) termasuk Kota Serang (kecuali tahun 2009-2010)

Gambar 2.1
Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Banten Tahun 2008-2010



Sumber : Banten Dalam Angka, BPS 2011

2.1.2 Aspek Pelayanan Umum

1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan penurunan laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tiga tahun terakhir untuk setiap kabupaten/kota dapat dilihat Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Capaian LPE Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2009-2011

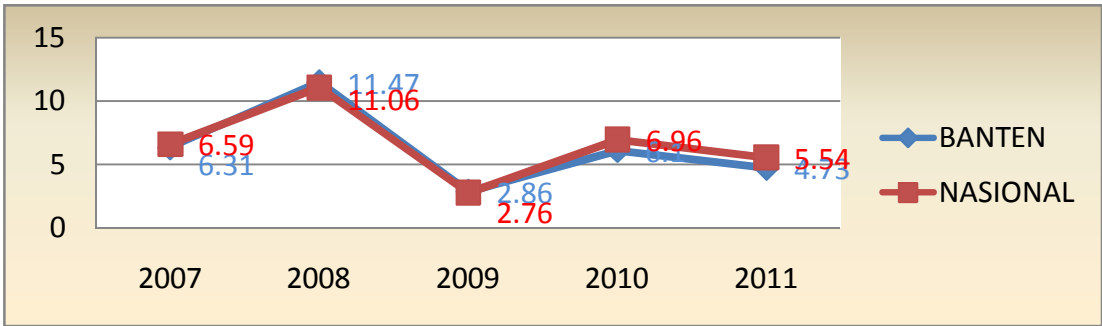
NO	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN		
		2009	2010	2011
Kabupaten :				
1	Pandeglang	4,21	6,77	6,81
2	Lebak	4,10	4,15	4,30
3	Tangerang	4,41	6,71	6,41
4	Serang	3,18	3,87	3,96
Kota :				
5	Tangerang	5,74	6,68	7,01
6	Cilegon	4,83	5,01	5,26
7	Serang	5,44	7,63	7,76
8	Tangerang Selatan	8,49	8,70	8,80
Provinsi Banten		4,69	6,08	6,43
Nasional		4,58	6,10	6,50

Sumber : BPS 2012

Struktur Perekonomian Banten sebagian besar kontribusi dari sektor sekunder(sektor industri pengolahan; sektor bangunan;sektor listrik, gas dan air bersih)sebesar 54,80%, kemudian sebesar 37,14% dari sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran;sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan,persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa). Sementara itu sebesar 8,06% berasal dari sektor primer (sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian).

Kondisi inflasi Banten pada level yang rendah didorong oleh relatif stabilnya kondisi pasokan komoditas bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta harga-harga komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Gambar 2.2
Grafik Perkembangan Laju Inflasi di Provinsi Banten
Tahun 2007-2011 (%)



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

2. Kesejahteraan Sosial

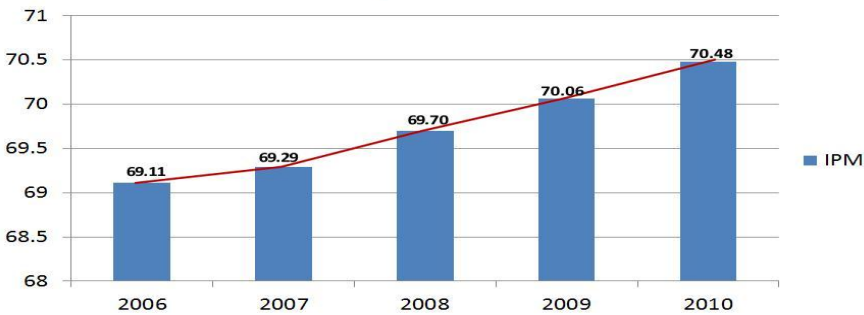
Kinerjapembangunan kesejahteraan sosial ditandai dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun sebaran capaiannya di kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2009-2010

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN	
		2009	2010
Kabupaten:			
1	Pandeglang	67,99	68,29
2	Lebak	67,45	67,67
3	Tangerang	71,45	71,76
4	Serang	68,27	68,67
Kota:			
5	Tangerang	74,89	75,17
6	Cilegon	74,99	75,29
7	Serang	69,99	70,61
8	Tangerang Selatan	75,01	75,38
Provinsi Banten		70,06	70,48

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2009-2010

Gambar 2.3
Grafik Perkembangan Tingkat IPM di Provinsi Banten
Tahun 2006-2010



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Kondisi penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Januari 2012, sampai dengan September 2011 tercatat sebanyak 690.874 jiwa (6,26%), sedangkan pada Maret 2011 tercatat sebanyak 690.490 jiwa (6,32 persen).

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai diantaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

Kinerja layanan pendidikan di Provinsi Banten dari Tahun 2008-2010 ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.5.

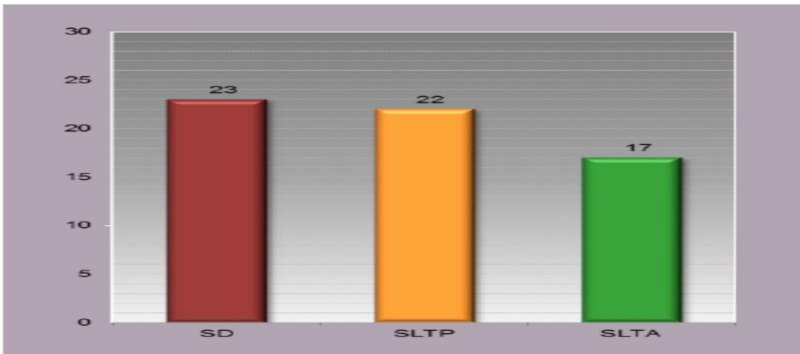
Tabel 2.5
Indikator Pendidikan di Provinsi Banten
Tahun 2008-2010

Uraian	2008	2009	2010
Angka Melek Huruf (persen)	95,60	95,95	96,20
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,10	8,15	8,32
Angka Partisipasi Sekolah (persen)			
- Usia 7-12 Tahun	97,56	97,85	98,01
- Usia 13-15 Tahun	79,87	80,88	81,70
- Usia 7-15 Tahun	92,03	92,20	92,81
- Usia 16-18 Tahun	48,40	50,00	50,90

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Ketersediaan fasilitas pendidikan akan menentukan kualitas pendidikan, dimana salah satu indikatornya adalah rasio murid-guru, yaitu rasio yang menggambarkan beban seorang guru dalam mengajar sekelompok murid. Di Banten, rasio murid-guru untuk tingkat SD, SLTP,SLTA rata-rata masih dibawah 25 murid. Hal ini bukan berarti proses belajar mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut sudah berlangsung optimal karena penempatan tenaga pengajar belum merata masih terkonsentrasi di perkotaan.

Gambar 2.4
Grafik Rasio Murid-Guru SD, SLTP dan SLTA di Provinsi Banten Tahun 2010



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

b. Kesehatan

Capaian kinerja layanan kesehatan selama periode 2008-2010 ditandai dengan Indikator penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH), jumlah tempat berobat dan tenaga kesehatan sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.6 dan Gambar 2.5.

Tabel 2.6
Statistik Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2008-2010

NO	INDIKATOR KESEHATAN	2008	2009	2010
1	AKB (Per 100 Kelahiran)	37	36	34
2	AHH (Tahun)	64,60	64,75	64,90
3	Angka Kesakitan (%)	37,17	37,70	33,02
	TEMPAT BEROBAT			
1	Praktek Dokter (%)	38,10	39,30	37,54
2	Petugas Kesehatan (%)	20,10	23,58	20,26
3	Pengobatan Tradisional (%)	1,62	1,08	0,74
4	Lainnya (%)	1,82	1,94	2,64

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Gambar 2.5
Grafik Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2010



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

c. Pekerjaan Umum dan Perhubungan

Layanan urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi layanan moda transportasi darat, laut dan udara. Sebagai gambaran tentang moda transportasi darat, data panjang jalan nasional dan provinsi, jumlah kendaraan bermotor, dan angkutan kereta api pada tahun 2009 sampai dengan 2010 sebagaimana termuat dalam Tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7
Statistik Transportasi Darat di Provinsi Banten
Tahun 2009-2010

Uraian	2009	2010
Panjang Jalan (km)		
- Jalan Negara	490,40	476,49
- Jalan Provinsi	889,01	770,09
Jumlah Kendaraan (unit)		
- Mobil Penumpang	63 365	69 909
- Mobil Barang	72 903	80 421
- Mobil Bus	189 097	219 535
- Sepeda Motor	2 027 977	2 451 466
Angkutan Kereta Api		
- Penumpang (orang)	4 555 933	5 508 704
- Barang (tribu on)	1,74	26,00

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Sedangkan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi pada tahun 2011 semula panjang jalan provinsi 770,09 km berubah menjadi 852,89 km.

Disamping itu gambaran tentang kondisi infrastruktur sumber daya air dapat terlihat dari kondisi jaringan irigasi provinsi dalam kondisi baik sebesar 82,27% dan kondisi sedang 12,23% sedangkan dalam kondisi rusak 7,5% dari 13 Daerah Irigasi (DI) seluas 20.474 ha.

Intensitas Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara terbesar di Indonesia sepanjang periode 2008-2010 menunjukkan peningkatan dengan jumlah penerbangan, penumpang dan kargo baik domestik maupun internasional sebesar 153,83 ribu pesawat, 20,23 juta orang penumpang dan 302,08 ribu ton kargo.

Salah satu pelabuhan penyeberangan terbesar di Banten adalah Pelabuhan Merak yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga menjadi pelabuhan penyeberangan tersibuk di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah trip angkutan penyeberangan di pelabuhan Merak sebanyak 27,11 ribu trip namun dibanding tahun 2009 yang berjumlah 27,61 ribu trip terjadi penurunan karena gangguan gelombang, perbaikan dermaga dan keterbatasan Kapal Ferry. Hal ini menyebabkan layanan penyeberangan terhambat, sehingga sering terjadi kemacetan di Jalan Tol Jakarta-Merak.

d. Perumahan

Sebagai gambaran tentang kondisi perumahan masyarakat di Provinsi Banten terlihat sebagaimana data statistik Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Statistik Perumahan di Provinsi Banten
Tahun 2009-2010 (%)

Uraian	2009	2010
Rumahtangga dengan rumah milik sendiri	74,35	72,33
Rumahtangga dengan luas lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$	71,53	72,18
Rumahtangga dengan lantai rumah bukan tanah	90,17	93,11
Rumahtangga dengan atap rumah dari genteng/beton	87,54	85,60
Rumahtangga dengan dinding rumah dari tembok	80,06	82,25

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2011) bahwa proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak baru sebesar 22,12% terhadap target RAD MDGs Provinsi Banten pada tahun 2015 adalah sebesar 35,19%. Sedangkan target Nasional sebesar 68,87%.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak ditahun 2011 adalah sebesar 64,15% terhadap target RAD MDGs Provinsi Banten pada tahun 2015 adalah sebesar 84,72%. Sedangkan target nasional sebesar 62,41%.

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan ditahun 2011 adalah sebesar 9,41%, terhadap target RAD MDGs Provinsi Banten pada

tahun 2015 adalah sebesar 12,7%. Sedangkan target nasional sebesar 8,26%.

e. Lingkungan Hidup

Sebagai gambaran, kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten relatif masih terjaga kelestariannya khususnya kawasan lindung seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan Gunung AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari).

Sedangkan kerusakan habitat ekosistem relatif terjadi di wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah pantai utara dan barat. Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang. Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara lain sedimentasi daerah pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara khususnya akibat pengembangan lahan tambak. Hal ini perlu pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih ketat pada kawasan pesisir dan pantai untuk budidaya perikanan dan industri yang lebih ramah lingkungan.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi.

Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu

(kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu pencemaran udara dan air juga merebak pada kawasan permukiman sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA) Desa Bagendung Kota Cilegon.

Produksi sampah perkotaan di Provinsi Banten sekitar 16.539 m³/hari atau sekitar 5.971.035 m³/tahun. Daerah penghasil sampah terbesar adalah Kabupaten Tangerang, yaitu sebesar 5.995 m³/hari, sedangkan produksi sampah di kota lainnya dibawah 4.000 m³/hari. Pengelolaan persampahan maupun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah belum cukup baik, hal ini ditandai dengan banyak dijumpainya pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, seperti dibadan sungai dan di pinggir jalan.

Pengelolaan limbah B3 masih belum optimal, dimana hingga saat ini ditenggarai masih adanya sejumlah perusahaan yang memperjualbelikan limbah B3. Disamping itu, permasalahan terkait dengan rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, yang mendapatkan reaksi terkait dengan kekhawatiran masyarakat setempat maupun masyarakat sekitarnya serta Pemerintah Kabupaten Serang dikarenakan lokasi yang terletak diwilayah perbatasan.

Ancaman bencana banjir sering terjadi pada wilayah Pandeglang (Kecamatan Patia, Sobang, Panimbang, Pagelaran), Lebak (Kecamatan Wanasalam), Cilegon, Serang dan Tangerang yang dikarenakan luapan aliran sungai yang melintasi daerah tersebut seperti sungai Cibama, Cilemer, Ciliman, Cibuangan, Cijalupang, Ciujung, Cidurian, Cisadane, Cirarap, Mookervat dan Kali Sabi.

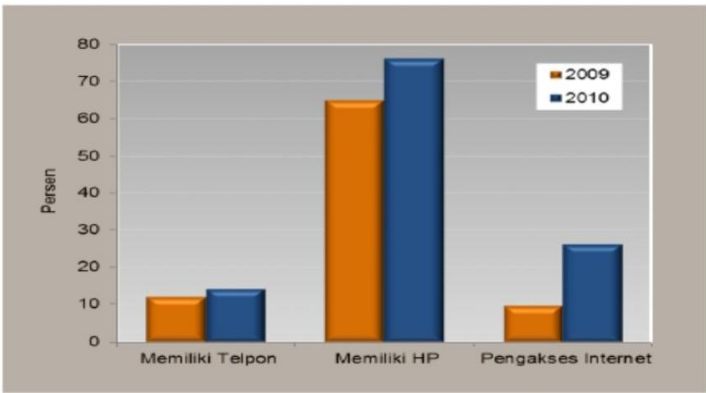
Ancaman gempa bumi yang terjadi selain gempa vulkanik akibat keberadaan anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, juga ada potensi gempa tektonik yang diakibatkan gesekan pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Wilayah perairan Indonesia merupakan tempat bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau Indo-Australia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng Pasifik di Timur.

f. Komunikasi dan Informatika

Cakupan layanan komunikasi dan informatika melalui media cetak dan media elektonik telah menjangkau hingga kepelosok wilayah Banten. Berdasarkan data Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Angka Tahun 2010, terdapat surat kabar nasional yang berjumlah 39 media dan surat kabar lokal sebanyak 6 media. Untuk layanan operator seluler sebanyak 7 operator, penyiaran radio dan TV sebanyak 51 buah stasiun radio dan 11 penyiaran TV.

Akses masyarakat Banten terhadap sarana telekomunikasi dan internet pada periode 2009-2010 meningkat sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase rumahtangga pemilik telepon rumah, HP dan pengakses internet masing-masing 14,25%, 76,28% dan 26,09%.

Gambar 2.6
Grafik Persentase Rumahtangga Pengguna Telepon dan Internet di Provinsi Banten Tahun 2009-2010



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

g. Penataan Ruang

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada masing-masing Kota di Provinsi Banten rata-rata masih kurang dari 30%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.9
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011

NO	KOTA	LUAS (HA)	PERSEN (%)
1	Serang	5.452.690	20,44
2	Cilegon	2.634.540	15,01
3	Tangerang	20.408.291,42	11,16
4	Tangerang Selatan	1.314.470	8,9

Sumber : RTRW Kota di Provinsi Banten

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan di tahun 2009 adalah sebesar 16,68%, sedangkan target MDGs pada Tahun 2015 adalah sebesar 26%. Rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan di tahun 2010 adalah sebesar 11,8%, sedangkan pada tahun 2015 target MDGs adalah sebesar 16%. Rasio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan Banten di tahun 2010 adalah 4,04% sedangkan target MDGs pada tahun 2015 adalah sebesar 6,30%.

Luas hutan negara di Provinsi Banten mengalami peningkatan antara tahun 2003 (78.649,61 ha) ke tahun 2005 (80.160,11 ha) dengan laju pertumbuhan sebesar 1,96%. Dengan demikian, proporsi hutan negara terhadap luas semakin meningkat, yaitu dari 8,94% menjadi 9,11%. Hingga tahun 2004, sebaran hutan secara dominan terdapat di Kabupaten Pandeglang 38.994,64 ha (48,64%) dan Kabupaten Lebak 35.366,73 ha (44,12%), sedangkan sisanya di Kabupaten Serang 4.384,43 ha (5,46%). Bila ditinjau menurut jenisnya, terjadi pergeseran yang drastis antara komposisi hutan lindung dengan hutan produksi dalam kurun waktu 2003-2004, dimana hutan lindung dengan luasan 25.116,01 ha (31,93% terhadap luas hutan negara) pada tahun 2003 menjadi 7.894,11 ha (9,84%) pada tahun 2004 atau dengan laju penurunan sebesar 69,17% (berkurang 17.221,90 ha). Pergeseran tersebut, khususnya disebabkan karena pengalihan fungsi hutan lindung menjadi 'hutan produksi terbatas' yang terjadi pada hutan lindung di seluruh kabupaten tersebut di atas, khususnya di Kabupaten Pandeglang (yang juga merupakan wilayah dengan keberadaan hutan lindung terluas) dengan laju penurunan mencapai 82,98% (12.689,59 ha).

Kawasan lindung pada tahun 2009 seluas 223.930,34 ha atau 25,88% dari luas wilayah Provinsi Banten, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Kawasan Lindung di Provinsi Banten
Tahun 2009

NO	KAWASAN LINDUNG	LUAS (HA)
1	Hutan Konservasi	126.397,30
2	Hutan Lindung	9.471,39
3	TWA Perairan Laut Sangiang	720,00
4	Perairan Laut TNUK	44.337,00
5	Hutan Bakau di Luar Kawasan Hutan	918,67
6	Kawasan Ulayat Baduy/Cagar Budaya	5.136,58
7	Kawasan Rawan Bencana Alam	36.161,97
8	Kawasan Lindung Sekitar Hulu Air	787,43
Jumlah		223.930,34

Sumber : Statistik Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2009

h. Tata Kelola Pemerintahan

Sejalan dengan kebijakan nasional dalam RPJMN 2010-2014, tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi terwujud dalam pemerintahan yang bersih, pelayanan publik berkualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi.

Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut guna membentuk birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat supaya hidup lebih aman, nyaman, tentram, rukun, damai, bersatu dan sejahtera.

Penerapan prinsip keterbukaan memenuhi amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saat ini telah dibentuk infrastruktur Pelayanan Informasi Publik (PPID dan PPID Pembantu) dan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten yang telah berfungsi dalam memfasilitasi berbagai sengketa informasi.

Perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diantaranya dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa instansi pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*) yaitu Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) yang diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Tanggal 20 Januari 2012 Nomor 999.05/KEP-Huk/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 999.05/KEP.1-Huk/2011 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Secara Elektornik Provinsi Banten sebagai salah satu wujud E-Goverenment. Dalam aspek akuntabilitas Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diperlukan kerja keras khususnya untuk membenahi kelemahan penataan administrasi aset daerah.

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal, merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam menerapkan efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelayanan perizinan. Hasil kinerja sinergis dari setiap SKPD berdampak pada kondisi Banten yang kondusif, aman, tentram dan nyaman sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan dan meningkatkan nilai investisinya di Banten. Terkait dengan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Banten telah membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Harmonisasi hubungan antar kelembagaan melalui sasaran penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD, tercermin dalam proses penyusunan produk hukum daerah melalui peraturan daerah, selama kurun waktu 2002-2012 telah diselesaikan sebanyak 41 peraturan daerah, baik yang bersifat usulan dari pemerintahan daerah maupun inisiatif DPRD. Rasio nota kesepakatan pemerintah daerah dengan DPRD mencapai 89,10%, sedangkan aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam anggaran pembangunan mencapai 87,98% dari tahun 2011.

Penataan peraturan daerah dilakukan melalui program peningkatan kesadaran dan pengembangan produk hukum melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi produk hukum pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan nilai capaian tahun 2011 sebesar 97,93%. Selain itu, rasio penegakan peraturan daerah dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda melalui capaian sebesar 99,71%. Dalam

rangka penegakan peraturan daerah tersebut, telah dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas PPNS secara rutin.

Selama kurun tahun 2007-2011, terkait dengan pembatalan peraturan daerah telah dilakukan pencabutan dan revisi atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan oleh Kementerian Keuangan, melalui Surat Rekomendasi Nomor S-148/MK.7/2007 tanggal 16 Juli 2007, dan revisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Guna meningkatkan profesionalisme birokrasi, Pemerintah Provinsi Banten melakukan penataan sistem manajemen SDM aparatur, pembuatan kartu pegawai elektronik (KPE) dan sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian (SAPK). Target kedepan akan dikembangkan sistem kepegawaian secara online dan pelayanan kepegawaian satu pintu (one stop service).

Kondisi aparatur birokrasi Provinsi Banten semula berjumlah 2.958 orang (2007), meningkat menjadi 3.868 orang (2011). Komposisi PNS menurut tingkat pendidikan didominasi lulusan S-1 (50,41%) SLTA (19, 59%), Diploma (16,64%), S-2 (12, 30%) sisanya SD, SLTP dan S-3. Pelanggaran disiplin pegawai mengalami penurunan dari semula 124 pelanggaran (2007) menjadi 51 pelanggaran. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan pembinaan disiplin pegawai.

Selain itu, dalam rangka penanganan dan pencegahan korupsi, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan/aset daerah telah dilaksanakan melalui Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dengan indikator tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan nilai capaian kinerja di tahun 2011 sebesar 79,78%. Hal ini perlu ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel.

i. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia 15-64 tahun merupakan angkatan kerja produktif, sebagai unsur utama. Data ketenagakerjaan di Provinsi Banten pada Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.11 dan 2.12.

Tabel 2.11
Struktur Ketenagakerjaan Penduduk di Provinsi Banten
Tahun 2010-2012

NO	KEGIATAN UTAMA	SAT	2010 (FEBRUARI)	2011 (AGUSTUS)	2012 (FEBRUARI)
1	Penduduk Usia >15 tahun	Orang	7.402.379	7.686.359	7.783.259
2	Angkatan Kerja	Orang	4.791.977	5.210.224	5.398.644
	a. Bekerja	Orang	4.113.360	4.529.660	4.818.967
	b. Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)	Orang	678.617	680.564	579.677
3	Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.610.420	2.476.135	2.384.615
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %)	%	64.74	67,79	69.36
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT %)	%	14,16	13,06	10.74

Sumber : Berita Resmi Statistik (7 Mei 2012)

Tabel 2.12
Data Tenaga Kerja dan Pengangguran di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KABUPATEN/ KOTA	ANGKATAN KERJA	PENGGANGGURAN	TPT(%)	TPAK(%)
Kabupaten:					
1	Pandeglang	513.487	58.108	11.32	64.28
2	Lebak	549.378	66.471	12,10	63.60
3	Tangerang	1.416,780	204,358	14,42	69.46
4	Serang	657,679	87.433	13.29	64.74
Kota:					
5	Tangerang	945.334	121.818	12.89	70.31
6	Cilegon	185.874	24.426	13.14	70.00
7	Serang	274.594	38.015	13.84	68.60
8	Tangerang Selatan	667.099	79.935	11.98	69.64
Jumlah		5.210.224	680.564	13.06	67.79

Sumber: Berita Resmi Statistik (Agustus 2011)

j. Ketahanan Pangan

Sejalan dengan kebijakan nasional tentang stok pangan 10 juta ton, maka ketahanan panganan menjadi salah satu isu strategis di Provinsi Banten. Sehubungan dengan layanan distribusi dan akses pangan masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten telah menyediakan 1 (satu) unit kendaraan warung pangan mobile sebagai antisipasi dalam menangani kerawanan pangan, selain itu masyarakat juga berperan aktif dengan dibentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Mengenai jumlah ketersediaan dan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Banten pada bulan Februari 2012, dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Rekapitulasi Cadangan Pangan di Provinsi Banten
Tahun 2012

URAIAN	KETERSEDIAAN (TON)	PEMANFAATAN (TON)	KETERANGAN
Cadangan Beras Provinsi	200	-	Di simpan Bulog
Cadangan Beras Kab/Kota			Di simpan Bulog, dan telah disalurkan untuk bantuan masyarakat akibat banjir, nelayan yg tdk bisa melaut, angin puting beliung
a. Kab Serang	100	70	
b. Kab Pandeglang	100	50	
c. Kab Tangerang	100	60	
d. Kab Lebak	100	50	
e. Kota Serang	100	22,5	
f. Kota Cilegon	100	-	
g. Kota Tangerang	100	-	
h. Kota Tangerang Selatan			
Jumlah	800	252,5	
Cadangan Pangan Provinsi Dana APBD Tahun 2011			Bantuan nelayan Kota Serang, Kab Serang, Kab Pandeglang, Kab Lebak, Kab Tangerang.
a. Kerjasama dengan Bulog	124	5	
b. Gapoktan (10)	79	-	
Jumlah	203	5	
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota)			
a. Kab Tangerang	36	-	
b. Kota Cilegon	43	-	
JUMLAH	79	-	
Cadangan Pangan Masyarakat (APBD dan APBN 2011)			
a. Lumbung Pangan (30)	100	-	
b. LDPM (17)	89	-	
Jumlah	189	-	

Sumber. Badan Ketahanan Pangan 2012 (Februari)

Dari sisi penganeekaragaman pangan sebagai bagian dari strategi pekuatan ketahanan pangan telah dilaksanakan berbagai program diantaranya penelitian komoditas keanekaragaman pangan diikuti dengan sosialisasinya termasuk lomba cipta menu pangan non beras, sebagai salah satu sumber energi dan protein. Adapun konsumsi pangan untuk kebutuhan energi dan protein dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Konsumsi Pangan di Provinsi Banten
Tahun 2010

NO	URAIAN	PERKEMBANGAN KONSUMSI PER KAPITA PER HARI					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Energi (kkal/kap/hari)	1996	1927	2015	2038	1958	1957
2	Protein gram/kap/hari)	55.27	53.66	57.65	57.43	59.17	59.98
Skor PPH		79.1	74.9	82.8	81.9	78.8	80.6

Sumber. Neraca Bahan Makanan Provinsi Banten 2011

Tingkat kerawanan pangan secara umum, Banten masuk dalam kategori 2, yaitu cukup rawan untuk ketersediaan pangan, tetapi berdasarkan indeks komposit penyerapan pangan secara keseluruhan termasuk agak tahan, dapatdilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Tingkat Kerawanan Pangan di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KAB/KOTA	INDEKS KOMPOSIT GABUNGAN	KETERANGAN
1	Kab.Pandeglang	4,2	Agak tahan
2	Kab. Lebak	4,4	Agak tahan
3	Kab.Serang	4,3	Agak tahan
4	Kab.Tangerang	3,9	Agak tahan
5	Kota Tangerang	3,5	Agak tahan
6	Kota Cilegon	3,5	Agak tahan
7	Kota Serang	4,0	Agak tahan
8	Kota Tangerang Selatan	3,6	Agak tahan

Sumber. Badan Ketahanan Pangan 2011

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten merupakan salah satu lumbung pangan nasional, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi yang diberikan (3% terhadap produksi nasional) dan menduduki peringkat ke 9 nasional pada tahun 2010.Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembangdengan baik, adapun luas lahan sawah di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Luas Lahan Sawah di Provinsi Banten
Tahun 2009

NO	KAB/KOTA	TEKNIS	$\frac{1}{2}$ TEKNIS	SEDERHANA	DESA	TADAH HUJAN	LAINNYA	JUMLAH
1	Kab.Pandeglang	2.853	5.289	7.575	8.964	30.058	0	54.739
2	Kab. Lebak	4.124	2.365	4.708	11.083	22.503	56	44.839
3	Kab.Serang	22.861	3.021	937	0	13.796	13	40.6284
4	Kab.Tangerang	14.801	6.177	3.578	6.823	14.164	160	45.685
5	Kota Tangerang	534	122	0	0	417	0	1.073
6	Kota Cilegon	115	0	107	167	1.744	0	2.133
7	Kota Serang	3.73	579	284	325	3.403	0	8.321
8	Kota Tangerang Selatan	0	0	12	53	47	0	112
Jumlah		49.018	17.553	17.201	27.415	86.114	229	197.53

Sumber. Badan Pusat Statistik Banten 2009

Komoditas utama tanaman pangan yang dikembangkan di Provinsi Banten terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, dengan tingkat produksi pada tahun 2011 sebagaimana Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KAB/KOTA	PADI	JAGUNG	KEDELAI	UBI KAYU	UBI JALAR	KACANG TANAH	KACANG HIJAU
1	Kab.Pandeglang	596.796	1.642	4.043	1.822	964	1.304	452
2	Kab. Lebak	480.483	823	763	1.429	654	526	85
3	Kab.Serang	392.703	150	-	408	104	160	-
4	Kab.Tangerang	381.228	573	130	2.008	848	3.938	252
5	Kota Tangerang	6.671	-	-	5	4	-	-
6	Kota Cilegon	13.918	23	-	66	18	2.54	33
7	Kota Serang	76.082	493	119	391	154	2.267	252
8	Kota Tangsel	1.444	125	35	170	92	180	-
Jumlah		1.949.714	3.828	5.095	6.295	2.839	10.916	1.075

Sumber. Badan Pusat Statistik Banten 2011

Komoditas tanaman hortikultura yang dikembangkan di Provinsi Banten meliputi tanaman Buah Golden Melon dari Kota Cilegon dan Serang, Jambu Citra dari Anyer Kabupaten Serang, Tanaman Buah Naga di Baros Kabupaten Serang, Bunga Anggrek di Kabupaten Tangerang dan Kota Serang, dan Obat-obatan Herbal. Selanjutnya mengenai data produksi buah, bunga dan obat-obatan pada Tahun 2011 sebagaimana Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Produksi Buah, Bunga dan Obat-obatan di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KOMODITAS	PRODUKSI	SENTRA PRODUKSI
I. Buah-buahan(Ton)			
1	Melon	85,90	Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon
2	Pisang	5.837.824	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
3	Jeruk	4.062.937	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
4	Mangga	1.306.043	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang dan Kota Serang
5	Nenas	1.406.438	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang
6	Manggis dan durian	493.946	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang
	Buah lainnya	2.504.611	
	Jumlah	15.620.389	
II. Bunga (Batang)			
	Anggrek	2.189.988	Kota Tangerang selatan
	phylodendrun	899.961	Kota Tangerang selatan
	Bunga lainnya	1.365.086	Kota Tangerang selatan, Kota Serang, Kab. Serang
	Jumlah	4.455.035	
III. Obat-obatan(Kg)			
	Non rimpang	67.026.287	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang
	Rimpang	355.297.255	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang
	Jumlah	422.305.542	

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten 2011

Produksi sayur-sayuran menunjukkan peningkatan yang cepat terutama sayuran dataran rendah, dengan komoditas andalannya jamur, petai, kacang panjang dan cabe besar pada tahun 2010 sebagaimana Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Produksi Sayuran di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KOMODITAS	PRODUKSI	SENTRA PRODUKSI
1	Jamur	116.701 ton	Kab. Serang, Kab. Pandeglang dan Kab. Tangerang
2	Petai	9.714 ton	Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan Kab. Serang
3	Kacang panjang	20.930	Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan Kab. Serang
4	Cabe besar	4.638	Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan Kab. Serang

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten 2011

Provinsi Banten juga merupakan salah satu produsen daging dan telur yang sangat potensial dalam skala nasional. Produksi dan sentra produksi peternakan dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Produksi dan Sentra Peternakan di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KOMODITAS	PERINGKAT (NASIONAL)	PRODUKSI (TON)	DAERAH PERSEBARAN
1	Sapi	4	20.300	Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang
2	Kerbau	6	3.700	Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang
3	Ayam Ras	5	86.100	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
4	Telur	8	41.600	Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten 2011

Gula aren, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh, dan coklat merupakan tujuh komoditas andalan perkebunan dengan luas lahan perkebunan rakyat sebesar 173.589 ha, perkebunan besar swasta 6.018 ha, dan PTP seluas 9.578 ha. Selanjutnya mengenai data luas tanam, produksi dan daerah penyebaran komoditas unggulan perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Luasan, Produksi dan Daerah Sebaran Komoditas Perkebunan
di Provinsi Banten Tahun 2010

NO	KOMODITAS	LUASAN (HA)	PRODUKSI (TON)	DAERAH PERSEBARAN
1	Kelapa	100.058,65	55.541,00	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang
2	Karet	26.492,93	12.547,40	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
3	Kelapa Sawit	18.462,47	25.865,04	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
4	Cengkeh	15.602,40	7.554,5	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Serang
5	Kopi	9.526,00	2.216,70	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, Kota Serang
6	Kakao	7.248,99	2.107,00	Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang
7	Aren	2.959,85	1,706,67	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang

Sumber: Statistik Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten 2011

Taman Hutan Raya merupakan salah satu kebanggaan Provinsi Banten, terletak di Kabupaten Pandeglang. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan konservasi dan agrowisata. Pemberdayaaan di kawasan ini dilaksanakan dengan pembinaan masyarakat desa disekitar hutan dengan mengembangkan hasil hutan non kayu seperti jamur dan madu.

Sebagai gambaran tentang kondisi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten dapat dilihat dari potensi kawasan pesisir dengan garis pantai sepanjang 519 km.

Upaya pengembangan kawasan pantai terutama untukwisata bahari, wisata pantai, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industry pengolahan hasil kelautan.Pengembangan kawasan perikanan baik tangkap, budidaya maupun bahari dilaksanakan dengan pendekatan minapolitan, komoditas utama yang dikembangkan adalah rumput laut, ikan bandeng dan kekerangan.Selanjutnya mengenai data produksi perikanan tangkap dan budidaya dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Produksi Perikanan di Provinsi Banten
Tahun 2010

NO	KOMODITAS	PRODUKSI (TON)
Perikanan Tangkap		
1	Kerapu	722
2	Manyung	1.369
3	Kakap	1.031
4	Kurisi	2.043
5	Cucut	1.398
6	Selar	2.136
7	Kue	1.158
8	Teri	2.753
9	Tenggiri	2.527
10	Tongkol	26.851
11	Jenis lainnya	21.863
Jumlah		63.150
Perikanan Budidaya		
1	Rumput Laut dan Ikan Bandeng	10.487
2	Udang Windu	44.187
3	Gurame	29.058
4	Ikan Patin	22.627
5	Jenis lainnya	359
Jumlah		106.000

Sumber: Statistik Perikanan 2011

Eksport produk hasil perikanan merupakan salah satu primadona andalan kelautan dan perikanan, capaian eksport pada tahun ini

sebesar 435.642 kg dengan tujuan negara Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Ikan hias juga menjadi salah satu andalan ekspor Provinsi Banten.

b. Energi dan Sumber Daya Mineral

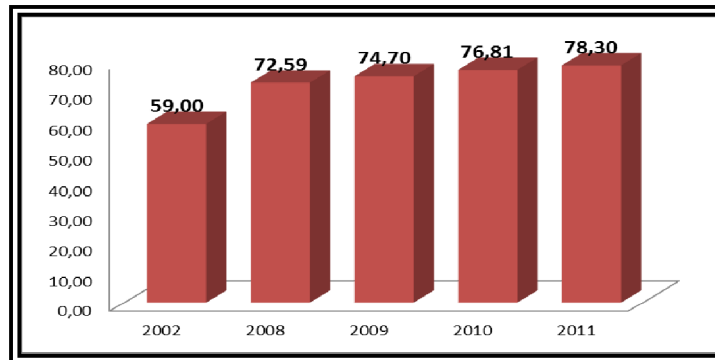
Peranan sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Banten dari tahun ke tahun cenderung stagnan. Hal ini setidaknya dapat dikonfirmasi oleh perkembangan jumlah perusahaan/usaha penggalian di Banten selama periode 2007- 2009 yang cenderung berfluktuasi. Meskipun demikian, jumlah pekerja pada periode yang sama meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan perusahaan. Hanya saja, balas jasa per tenaga kerja setelah sempat naik dari 15,51 juta rupiah menjadi 16,68 juta rupiah pada tahun 2008, pada tahun 2009 akhirnya turun menjadi 13,56 juta rupiah per pekerja.

Sebaliknya, sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk Banten tapi juga untuk Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Tingkat efisiensi distribusi listrik PLN di Banten semakin membaik, karena persentase energi listrik yang susut selama proses distribusi mengalami penurunan dari 7,70% pada tahun 2009 menjadi 6,34% pada tahun 2010. Sedangkan jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2010 mencapai 16,29 juta MWh, dengan lebih dari dua pertiganya dibeli oleh pelanggan sektor industri. Pelanggan rumah tangga meskipun jumlahnya jauh lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik hanya sekitar seperlima dari total energi listrik yang terjual.

Sampai tahun 2011 rasio elektrifikasi di Provinsi Banten mencapai 78,93%, yang berarti masih berada diatas rasio elektrifikasi Nasional maupun rasio elektrifikasi Provinsi Jawa Barat. Rata-rata rasio elektrifikasi Nasional 72,95%, serta rasio elektrifikasi di Provinsi Jawa Barat 70.72 %. Perkembangan rasio elektrifikasi dari tahun ke

tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.7 dibawah ini.

Gambar 2.7
Perkembangan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten
Tahun 2002-2011 (%)



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

c. Industri dan Perdagangan

Sektor industri pengolahan merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang setiap tahun selalu mendominasi perekonomian Banten. Hanya saja, jumlah perusahaan Industri Besar dan Sedang (IBS) di Banten sepanjang periode 2007-2009 justru mengalami penurunan hingga menjadi 1.695 unit. Penyerapan tenaga kerja juga menurun dari 0,49 juta orang pada tahun 2007 menjadi 0,47 juta orang di tahun 2009. Sebaliknya, Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diciptakan terus meningkat hingga menjadi 79,49 triliun rupiah pada tahun 2009. Akibatnya, NTB per tenaga kerja meningkat dari 123 juta rupiah menjadi 168 juta rupiah pada tahun 2009.

Secara spasial, IBS Banten terkonsentrasi antara lain di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan bagian timur Kabupaten Serang dengan teknologi produksi kebanyakan padat tenaga kerja. Kemudian, Kota Cilegon dan bagian barat Kabupaten Serang yang cenderung sebagai daerah konsentrasi industri padat modal. Secara keseluruhan persentase jumlah perusahaan, tenaga kerja dan NTB untuk ke empat kabupaten/kota tersebut mencapai 92,98%, 93,50% dan 95,70%. Sedangkan perbedaan teknologi produksi antara IBS di kabupaten/kota tersebut dapat dilihat dari tingkat produktivitas tenaga kerja yang dalam hal ini diukur dengan NTB per tenaga kerja, dengan tingkat produktivitas tenaga kerja IBS padat modal lebih tinggi dibanding IBS padat tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja untuk Kabupaten Tangerang; Kota Tangerang;

Kabupaten Serang dan Kota Cilegon masing-masing sebesar 100,50 juta rupiah; 152,52 juta rupiah; 254,72 juta rupiah dan 696,88 juta rupiah per tenaga kerja.

Menurunnya pertumbuhan ekspor yang lebih besar dari pada impor menyebabkan defisit perdagangan Banten terhadap luar negeri semakin membesar dan mencapai sekitar USD 1,25 miliar. Menurunnya ekspor disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor komoditas utama Banten seperti ekspor kimia dasar, besi/baja, tekstil, kertas dan kayu/gabus. Penurunan ekspor tersebut disebabkan kondisi pertumbuhan ekonomi dunia terutama negara mitra dagang Banten seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Cina mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang memicu menurunnya permintaan barang dari Banten. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memburuk pada tahun 2012 khususnya permintaan barang dari negara-negara Eropa. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang dan USA diperkirakan telah mulai pulih pada tahun 2012.

Tabel 2.23
Perkembangan Ekspor dan Impor di Provinsi Banten
Tahun 2010 - 2011

URAIAN		2010				2011			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
Ekspor	Nilai (US Ribu)	1,712,109	1,918,230	1,854,871	2,254,436	2,205,904	2,461,159	2,485,908	1,520,414
	Volume (Ribu Ton)	890	886	925	1,211	987	957	991	551
Impor	Nilai (US Ribu)	3,884,236	3,777,695	3,483,130	4,713,266	4,585,147	5,063,459	5,257,994	3,867,507
	Volume (Ribu Ton)	2,499	2,622	2,715	3,475	3,475	364	3,450	2,019

Sumber: Bank Indonesia 2012

Nilai ekspor Banten pada triwulan IV tahun 2011 masih mengalami peningkatan, tetapi berdasarkan volumenya telah mengalami penurunan yang signifikan pada periode laporan. Akibatnya pertumbuhan ekspor Banten kian melambat. Di sisi lain, nilai impornya secara bulanan semakin meningkat dan pertumbuhannya lebih tinggi dari pada ekspor Banten. Dampaknya, defisit transaksi perdagangan Banten dengan luar negeri semakin membesar dan mencapai angka sekitar USD 1,25 miliar pada bulan Desember 2011 saja, tetapi jika dikumulatifkan akan mencapai lebih dari USD 7,5 miliar.

Pertumbuhan ekspor Banten pada akhir tahun 2011 ini mendekati posisi tahun 2009 sebagai dampak krisis global sejak tahun 2008. Kondisi ini diperkirakan dapat berulang karena krisis global mulai kembali berkejolak di akhir tahun 2010 yang dampaknya akan mulai dirasakan 1 tahun setelah krisis tersebut dimulai, seperti pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Upaya-upaya strategis perlu dilakukan sejak dari perencanaan bahan baku hingga target pasar oleh industri di wilayah Banten. Namun langkah ini akan sulit dilakukan tanpa dukungan pihak pemerintah, kestabilan sistem keuangan dan iklim yang kondusif. Kejadian banyaknya perusahaan tekstil dan kimia dasar di Banten yang menutup usahanya pada tahun 2009 perlu dicermati agar tidak berulang pada tahun 2011 hingga di tahun mendatang. Perusahaan yang banyak menampung tenaga kerja di Banten antara lain pabrik tekstil, alas kaki dan industri makanan. Saat ini, dari grafik beberapa komoditas ekspor terlihat adanya penurunan pertumbuhan ekspor pada industri pengolah kayu dan gabus, tekstil, besi/bajatan produk kimia dasar. Ekspor industri mineral tidak mengandung logam termasuk salah satu industri yang masih meningkat eksportnya.

Ekspor luar negeri industri besi/baja Banten menurun lebih disebabkan seiring menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia, harga komoditas tersebut cenderung menurun dan meningkatnya harga minyak dunia yang menyebabkan biaya produksi semakin meningkat dan berdampak pada penurunan permintaan. Di sisi lain, penjualan di dalam negeri tetap memiliki prospek yang cerah seiring rencana pemerintah dalam Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang banyak membutuhkan produk besi baja terutama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan konstruksi lainnya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Oleh karena itu, salah satu industri terbesar baja nasional di Banten terus melakukan ekspansi proyek pembangunan pabrik *blast furnace* yang akan segera direalisasikan setelah mendapat pembiayaan dari salah satu grup besar perbankan besar dunia pada tahun 2012. Selain itu, pembangunan pabrik baja baru yang akan berpatungan dengan perusahaan dari Korea diperkirakan akan menyerap 100.000 tenaga kerja pada tahun 2013. Pabrik baja tersebut akan memproduksi 3

juta ton slab per tahun dan plat baja sebanyak 1,5 juta ton per tahun untuk kebutuhan pasar dalam negeri dan sisanya untuk kebutuhan produksi pabrik baja patungan itu sendiri di Banten. Kapasitas produksi pada tahun 2011 diperkirakan akan meningkat di akhir tahun 2011 setelah beberapa proyek strategis terkait finalisasi revitalisasi fasilitas produksi *Hot Strip Mill* (HSM) yang telah selesai pada bulan Mei 2011. Peningkatan produksi diperkirakan menjadi 2,4 juta ton per tahun dari sebelumnya hanya 2 juta ton per tahun.

d. Pariwisata

Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Pada tahun 2010 di Banten terdapat 228 usaha akomodasi dengan 6.167 kamar dan 9.801 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut, 39 unit diantaranya merupakan hotel berbintang dengan tingkat hunian kamar hotel sebesar 41,69%, lebih tinggi dibanding hotel non bintang yang hanya 26,18%.

Jumlah tamu yang menginap di hotel pada tahun 2010 mencapai 1,15 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 0,05 juta orang dan 1,10 juta wisatawan nusantara. Dilihat dari komposisinya, hampir semua wisatawan mancanegara menginap di hotel berbintang, yaitu dengan persentase mencapai 98,99%. Sedangkan wisatawan nusantara yang menginap di hotel berbintang persentasenya hanya 43,80%.

Tabel 2.26
Statistik Perhotelan di Provinsi Banten
Tahun 2008-2010

Uraian	2008	2009	2010
Akomodasi (unit)			
- Hotel Berbintang	37	37	39
- Hotel Non Bintang	189	178	189
- Total	226	215	228
Jumlah Kamar (unit)			
- Hotel Berbintang	2 641	2 775	2 765
- Hotel Non Bintang	3 219	3 014	3 402
- Total	5 860	5 789	6 167
Jumlah Tempat Tidur (unit)			
- Hotel Berbintang	4 248	4 184	4 208
- Hotel Non Bintang	5 722	4 828	5 593
- Total	9 970	9 012	9 801
Tingkat Hunian Kamar (persen)			
- Hotel Berbintang	46,89	42,07	41,69
- Hotel Non Bintang	33,13	30,5	26,18
- Total	39,33	36,05	32,84

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

2.4.4 Aspek Daya Saing Daerah

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Menurut Kelompok Barang Pangan/Non Pangan

Gambaran tingkat kemampuan ekonomi daerah tentang Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita sebulan menurut Kelompok Barang Pangan/Non Pangan di Provinsi Banten Tahun 2010-2011 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang di Provinsi Banten Tahun 2010-2011 (Rp)

NO	URAIAN	KOTA		DESA		KOTA + DESA	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	Total Pengeluaran RT (Jumlah makanan)	338.137	361.733	234.516	262.388	296.896	328.623
2	Total Pengeluaran RT (Non makanan)	470.739	460.829	160.440	170.402	347.242	365.364
Jumlah		808.876	822.562	394.956	436.790	644.138	693.987

Sumber : Banten Dalam Angka, BPS 2011

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan dari indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Selain itu, NTP biasa digunakan sebagai indikator proxy kesejahteraan petani. Pencapaian NTP Banten tahun 2011 didapat angka rata-rata 106,54%, dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.26
Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Banten Tahun 2010 - 2011

SUB SEKTOR	2010			2011		
	It	Ib	NTP	It	Ib	NTP
Tanaman Pangan	128,31	128,21	100,07	140,97	134,30	104,96
Tanaman Hortikultura	134,25	126,68	105,98	144,48	132,56	108,99
Tanaman Perkebunan Rakyat	129,50	126,66	102,24	136,20	132,28	102,97
Peternakan	131,12	124,04	105,71	131,94	129,44	101,94
Perikanan	125,94	129,94	96,93	132,16	135,37	97,63
Gabungan	129,81	127,44	101,86	143,96	135,12	106,54

Keterangan : It = Indeks Yang Diterima

Ib = Indeks Yang Dibayar

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Banten 2012

2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari jaringan infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah, serta sebagai interkoneksi wilayah.

a. Transportasi

Infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Pada tahun 2011, tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi sepanjang **852,89**km dalam kondisi mantap (baik dan cukup) sebesar 64.15% (547,1 km) dan kondisi rusak 35,87% (305,79 km). Dengan tingkat kemantapan sebesar 64.15% tersebut, 35,87% dari panjang jaringan jalan provinsi berada pada kondisi rusak. Hal ini disebabkan karena sudah habisnya umur rencana jalan pada sebagian besar ruas jalan provinsi sehingga kondisi struktur jalan menjadi labil. Rendahnya tingkat kemantapan jalan ini juga disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST). Selain itu, kurangnya jaringan jalan tol, serta belum terintegrasinya seluruh jaringan jalan di Banten dengan baik termasuk dengan sistem jaringan jalan tol, menyebabkan rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan di Banten.

Tabel 2.27
Panjang Jalan Menurut Type Permukaan,
Kondisi dan Kategori Jalan di Provinsi Banten Tahun 2011

URAIAN	TINGKATAN JALAN	
	JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI
Kondisi Permukaan :		
- Aspal	476,49	758,91
- Berbatu	-	11,18
- Tanah	-	-
Kondisi Jalan :		
- Baik	440,89	335,64
- Cukup	-	211,46
- Rusak	35,60	305,79
- Sangat Rusak	-	-
Jumlah/ Total	476,49	852,89

Sumber: Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 2011

Selanjutnya guna meningkatkan daya saing khususnya terkait dengan transportasi, di Provinsi Banten telah terdapat 4 (empat) bandara yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara Budiarto Curug, Bandara TNI-AU Gorda dan Bandara Pondok Cabe. Begitu juga dengan moda transportasi laut, di dimana terdapat 2 (dua) pelabuhan penyeberangan, 3 (tiga) pelabuhan umum, 40 (empat puluh) pelabuhan khusus, dan 6 (enam) pelabuhan perikanan. Semuanya ini untuk mendukung kelancaran transportasi di Provinsi Banten.

b. Listrik dan Energi

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga, sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk Banten tapi juga untuk Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Tingkat efisiensi distribusi listrik PLN di Banten semakin membaik, karena persentase energi listrik yang susut selama proses distribusi mengalami penurunan dari 7,70% pada tahun 2009 menjadi 6,34% pada tahun 2010. Sedangkan jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2010 mencapai 16,29 juta MWh, dengan lebih dari dua per tiga nya dibeli oleh pelanggan sektor industri. Pelanggan rumah tangga meskipun jumlahnya jauh lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik hanya sekitar seperlima dari total energi listrik yang terjual.

Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di Banten, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Di tingkat

masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti di dalam merespon kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh potensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis-jenis energi alternatif akan menjadi pilihan manakala memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan penyediaannya perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya.

c. Hotel dan Pariwisata

Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor Pariwisata. kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Pada tahun 2010 kunjungan wisatawan mencapai 1,15 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 0,05 juta orang dan 1,10 juta wisatawan nusantara. Dilihat dari komposisinya, hampir semua wisatawan mancanegara menginap di hotel berbintang, yaitu dengan persentase mencapai 98,99%. Sedangkan wisatawan nusantara yang menginap di hotel berbintang persentasenya hanya 43,80%.

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja subsektor perhotelan dan pariwisata dalam mendukung perekonomian daerah, Provinsi Banten memiliki momentum peluang bagi tumbuhnya investasi baru pada sub sektor tersebut dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang. Penetapan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang KEK Tanjung Lesung pada tanggal 23 Februari 2012.

3. Iklim Berinvestasi

Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten semakin meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia pada periode yang akan datang. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terbaru, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun

2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu tahun 2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63 miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada tahun 2010 (Rp 5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Ke depan, perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri. Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor swasta dan rumah tangga, yang terdiri dari sumbangan sektor K-UMKM sebesar 48,78%, sedangkan sektor Pemerintah terdiri dari APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota 7,35%.

Perbankan di Provinsi Banten telah menunjukkan kinerja positif sebagai lembaga intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah berfungsi sebagai development agent penarik investasi dimana selisih jumlah penyaluran pembiayaan dengan dana pihak ketiga (simpanan) pada tahun 2011 sebesar Rp. 62,22 trilyun. Dari penyaluran jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp. 112,22 trilyun termasuk didalamnya penyaluran langsung oleh bank pelapor sebesar Rp. 51,951 trilyun.

Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan pada tahun 2011 menurut sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek terbesar pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 200% diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi sebesar 151%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 72% dan sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 56%. Besaran pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor tersebut memberikan gambaran daya tarik investasi yang tinggi. Sementara pertumbuhan di sektor konstruksi dan pengangkutan sebagai sektor pendukung aktifitas ekonomi memiliki gambaran pertumbuhan investasi pada sektor lain yang bergerak di sektor produksi. Hal ini ditandai pula dengan data besaran pertumbuhan pembiayaan kredit investasi sebesar 51% dan kredit modal kerja sebesar 32,50%.

Pembiayaan kredit pada UKM berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,725 trilyun termasuk KUR sebesar Rp. 1,317 trilyun. Penyaluran terbesar kredit UKM pada sektor perdagangan sebesar Rp. 6,67 trilyun di sektor industri pengolahan sebesar Rp. 4,096 trilyun.

4. Sumber Daya Manusia

Penduduk merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan dewasa ini. Jumlah penduduk yang besar apalagi dengan komposisi dan distribusi yang lebih merata, dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan apabila berkualitas rendah. Karena itu, proses pembangunan yang dilakukan selain diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, harus pula mencakup upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan serta menyeimbangkan komposisi dan distribusi penduduk.

Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Banten sudah mencapai 10,63 juta orang. Penduduk laki-laki berjumlah 5,44 juta orang, lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang hanya 5,19 juta orang. Dengan demikian, rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Banten pada tahun 2010 sekitar 101,5 atau terdapat 1.015 penduduk laki-laki diantara 1.000 penduduk perempuan.

Dibanding tahun 2000, penduduk Banten tumbuh sangat pesat yaitu rata-rata mencapai 2,78% per tahun. Padahal, penduduk Indonesia pada periode yang sama hanya tumbuh rata-rata sebesar 1,49% per tahun. Akibatnya, persentase penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 3,95% pada tahun 2000 menjadi 4,48% pada tahun 2010. Disamping itu, pada tahun 2010 Banten juga berhasil menggeser DKI Jakarta sebagai provinsi dengan populasi terbanyak kelima di Indonesia, setelah Jawa Barat (18,12%), Jawa Timur (15,77%), Jawa Tengah (13,63%) dan Sumatera Utara (5,46%).

Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor daya saing daerah yang menentukan dalam rangka menarik investasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar sekitar 2,35 juta orang tenaga kerja di Provinsi Banten bekerja antara 35 sampai 49 jam per minggu dan berdomisili di wilayah Tangerang, Serang dan

Cilegon, yang terkenal sebagai pusat bisnis dan industri. Kedua sektor tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja masing-masing sebesar 26,18% dan 22,77%. Sementara itu, Sektor Pertanian berada pada posisi ketiga dalam penyerapan tenaga kerja yaitu dengan serapan sebesar 20,12% dari keseluruhan tenaga kerja, dan terlihat mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

Setiap tahun selama periode 2009-2011, secara rata-rata dua dari tiga penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) di Banten memasuki pasar kerja. Hal ini terlihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang memberikan gambaran besarnya persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 dimana jumlah angkatan kerja sebesar 4.854.184 jiwa dan yang bekerja sebesar 4.153.681 jiwa sehingga TPAK adalah sebesar 65,34% dan angka tingkat ketergantungan adalah sebesar 34,66%.

Jumlah angkatan kerja sendiri cenderung bertambah, dari 4,36 juta orang pada tahun 2009 menjadi 5,16 juta orang pada Februari 2011. Persentase penduduk usia kerja yang bekerja dari tahun 2009 sampai Februari 2011 terus meningkat dari 85,03% menjadi 86,50%. Berarti, tingkat kesempatan kerja di Banten terus meningkat. Akibatnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan hingga menjadi 13,50% pada februari 2011. Meskipun demikian, angka pengangguran ini masih tetap tertinggi di Indonesia karena TPT provinsi lainnya berkisar antara 2,67% (Nusa Tenggara Timur) dan 10,83% (DKI Jakarta).

Berdasarkan data pendidikan angkatan kerja menurut kategori penduduk sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 total jumlah angkatan kerja sebesar 4.854.184 jiwa didominasi oleh tingkat pendidikan SD kebawah sebesar 2.035.415 jiwa atau 41,93%. Diikuti dengan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA masing masing sebesar 930.491 jiwa (19,17%) dan 1.432.985 jiwa (20,59%). Sementara tingkat D1 sampai dengan S1, S2, dan S3 hanya berjumlah 455.293 jiwa (18,31). Jumlah angkatan kerja yang terserap berdasarkan pendidikan sebesar 4.153.681 jiwa yang didominasi oleh pendidikan SD kebawah sebesar 1.708.861 jiwa (41,14%) dan pendidikan SLTA sebesar 1.253.488 (30,18%) serta pendidikan SLTP sebesar 759.044 (18,7%), sedangkan

yang berpendidikan Perguruan Tinggi D1 sampai dengan S1,S2 dan S3 sebesar 432.288 (10,41%). Dengan demikian jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan sebesar 700.503 jiwa yang sebagian besar di dominasi oleh tingkat pendidikan SD sebesar 326.554 jiwa (46,62%), pendidikan SLTP sebesar 171.447 jiwa (24,47%) dan SLTA sebesar 179.497 (25,6%). Sementara yang berpendidikan tinggi (D1 sampai dengan S1,S2 dan S3) tinggal 23.005 (3,28%).

Tingginya angka pengangguran Banten bila diamati secara spasial sepertinya berkaitan erat dengan fenomena migrasi penduduk. Terdapat tiga kabupaten/kota dengan TPT di bawah angka pengangguran Banten. Diantaranya adalah Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang merupakan daerah perdesaan dimana perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, sehingga bukan menjadi daerah tujuan migrasi. Kemudian Kota Tangerang Selatan sebagai daerah termaju di Banten yang perekonomian didominasi oleh sektor ekonomi modern, karena itu relatif kurang menarik untuk menjadi daerah tujuan migrasi dibanding wilayah Tangerang lainnya. Sedangkan lima kabupaten/kota yang memiliki TPT di atas angka pengangguran Banten merupakan daerah tujuan migrasi dengan berbagai sebab, antara lain adalah daerah dengan sektor perindustrian yang sangat dominan, ibukota Provinsi Banten dan adanya disparitas tingkat upah.

Upah minimum Provinsi (UMP) di Banten selama periode 2008-2010 secara nominal terus mengalami kenaikan. Meskipun demikian, UMP riil (dibanding laju inflasi) selama periode tersebut sesungguhnya cenderung mengalami penurunan. UMP Banten sendiri pada tahun 2010 mencapai 955 ribu rupiah, lebih tinggi dibanding rata-rata UMP Nasional yang hanya 908 ribu rupiah.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2011

Untuk mengukur tingkat kinerja pada empat agenda pembangunan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), harus merujuk pada rencana capaian ke 4 (empat) agenda tersebut sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012. Ada sembilan indikator makro pembangunan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Indikator tersebut yaitu :

- 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
- 3. Indeks Pembangunan Daerah (IPD)
- 4. Indeks Pembangunan Gender (IPM-G)
- 5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 6. Jumlah Penduduk Sangat Miskin (Penduduk Miskin)
- 7. Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM)
- 8. Jumlah Pengangguran Terbuka
- 9. Persentase Pengangguran Terbuka

Kondisi capaian 9(sembilan) indikator makro pembangunan di Provinsi Banten tahun 2011 terlihat sebagaimana Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2010 – 2011

No	Indikator	Sat	2010	2011		Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	70,48	71,06-72,34	72,47	101,07%
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,08	6,10-6,35	6,43	103,21%
3	Indeks Pembangunan Daerah (IPD)	%	83,92	85,00-89,20	93,15	106,95%
4	Indeks Pembangunan Gender (IPM-G)	%	64,00	65,80	65,00	98,78%
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	52,50	53,80	53,00	98,51%
6	Jumlah Penduduk Sangat Miskin	Jiwa	758.163	700.000-650.000	690.874	97,70%
7	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM)	%	26,43	27,00-25,00	24,58	109,92%
8	Jumlah Pengangguran Terbuka	Jiwa	726.377	620.000	680.564	91,10%

No	Indikator	Sat	2010	2011		Capaian %
				Target	Realisasi	
9	Persentase Pengangguran Terbuka (% jumlah pengangguran/jumlah penduduk)	%	6,82	6,00-5,60	7,15	87,06%
	Persentase Pengangguran Terbuka (% jumlah pengangguran /Jumlah angkatan kerja)	%	13,68	12,77	13,06	97,73%

Pencapaian indikator-indikator makro ini merupakan capaian kinerja dari seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten baik pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta kontribusi terbesar berasal dari swasta dan masyarakat.

Adapun hasil capaian Kinerja Utama Provinsi Banten Tahun 2011 yang juga disesuaikan dengan ke-4 (empat) agenda pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut :

1. Agenda Pemerintahan

Untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi Banten pada agenda pemerintahan, dapat dilihat dari capaian kinerja program-program yang diselenggarakan pada agenda pemerintahan. Program – program tersebut adalah:

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah

Sasaran dalam program ini adalah ketersediaan sarana – prasarana aparatur pemerintahan yang memadai. Indikator untuk mengukur program ini adalah Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan dengan nilai capaian 100%, Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD Nilai capaian 100%. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan keluar daerah nilai capaian 100%, Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur nilai capaian 100%, dan Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD

dengan nilai capaian 100%, Standar pelayanan minimal pada SKPD yang berkaitan langsung pada pelayanan publik dengan nilai capaian 100%. Rasio koordinasi dan fasilitasi penataan daerah otonom baru dengan nilai capaian 100%. Sehingga rata-rata nilai capaian program ini sebesar 100%. Jumlah kesepakatan pembangunan dengan pemerintah perbatasan, regional dan bilateral dengan nilai capaian 100%.

b. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Ada empat sasaran yang hendak dicapai dalam program ini yaitu:

1) Meningkatkan Pemerataan/Penempatan Sumberdaya Aparatur

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada dua indikator capaian kinerja yang digunakan yaitu: Cakupan Fasilitas PNS pindah dan purna tugas yang memperoleh pembekalan/penghargaan yang ditargetkan tahun 2011 sebesar 100% dan terealisasi 80,27% sehingga nilai capaian kinerjanya 80,27%. Cakupan pembinaan mental, disiplin, kompetensi dan peningkatan sumber daya aparatur serta penataan administrasi bidang kepegawaian target tahun 2011 sebesar 20,00% dan terealisasi sebesar 19,17%, sehingga nilai capaian indikator ini 95,85%. Rata-rata nilai capaian sasaran peningkatan pemerataan/penempatan sumber daya aparatur adalah 88,06%.

2) Penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada dua indikator capaian kinerja yang digunakan yaitu: Target Rasio Belanja Pegawai dalam total Belanja Tidak Langsung pada tahun 2011 adalah sebesar 30,29% dengan realisasi sebesar 30,29%, sehingga nilai capaian kinerja sasaran ini sebesar 100%. Penataan Regulasi manajemen sumberdaya aparatur terbagi dalam empat kegiatan yaitu Kegiatan fasilitasi administrasi pejabat negara dan DPRD,

Fasilitasi bina pendapatan daerah provinsi Banten dan Fasilitasi desk pemilukada Provinsi Banten tahun 2011, Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur bidang pemerintahan, Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Banten tahun 2011 target masing – masing 17,95% dan realisasi empat kegiatan tersebut masing masing 17,95%, sehingga capaian kinerja keempat sasaran ini masing masing 100%.

3) Pemanfaatan Pegawai untuk Penanganan Program/Kegiatan Strategis Pembangunan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada satu indikator capaian kinerja yang digunakan yaitu : Target rasio Pembinaan dan Peningkatan Disiplin serta Profesionalisme SDM Aparatur pada tahun 2011 adalah sebesar 19,97% dengan realisasi sebesar 19,97% sehingga nilai capaian kinerja sasaran ini sebesar 100%.

4) Pemantapan Budaya Kerja Aparatur yang Profesional dan Cerdas dan sesuai aturan formal

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada satu indikator capaian kinerja yang digunakan yaitu: Rasio Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Seminar, Lokakarya, Workshop serta Sosialisasi peraturan Perundang-undangan pada tahun 2011 adalah sebesar 32,79% dengan realisasi sebesar 32,14%, dengan demikian nilai capaian kinerja sasaran ini sebesar 98,02%.

c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Ada dua sasaran dalam penyelenggaraan program ini, yaitu penguatan komunikasi pemerintahan antara Pemda dan DPRD dan Peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program ini adalah : Target Rasio Nota Kesepakatan dengan DPRD pada tahun 2011 adalah 100% terealisasi 61,47% dengan demikian nilai capaian kinerja sebesar 61,47%, target Rasio

Aspirasi Masyarakat yang terakomodir dalam Anggaran Pembangunan tahun 2011 adalah sebesar 100%, sedangkan realisasinya 87,98%, capaian kinerja 87,98%. Rata – rata nilai capaian kinerja program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah adalah sebesar 74,73%.

d. Perencanaan Pembangunan Daerah

Ada empat sasaran yang hendak di capai dalam penyelenggaraan program perencanaan pembangunan yaitu Tersedianya dokumen rencana aksi program – program strategis, tersedianya dokumen penganggaran sesuai kinerja dan kebutuhan, tersedianya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat, dan tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Berdasarkan 4 indikator kinerja yang digunakan yaitu Jumlah RAD Penanggulangan Kemiskinan, Jumlah Dokumen Penganggaran Tahunan Daerah, Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah, Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Anggaran Pembangunan, capaian kinerja masing-masing indikator 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja program sebesar 100%.

e. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Sasaran program ini adalah Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah. Untuk mengukur sasaran ini indikator yang digunakan adalah rasio Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap jumlah obyek pemeriksaan, target untuk tahun 2011 adalah 87% dan realisasinya sebesar 83% sehingga nilai capaian kinerjanya sebesar 95,40%.

f. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Ada dua sasaran dalam program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yaitu : Rasio Pembentukan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BNP, Badan Koordinasi

Penyuluh Pertanian Peternakan Kehutanan, KPAID, KPID, BKSP, SET KORPRI, Komisi Aid dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) dan Rasio Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah, Rasio Kelembagaan/SKPD Terhadap Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan Pembangunan, Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD.

Target Rasio Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah tahun 2011 adalah 77,78% terealisasi 77,78% sehingga nilai capaian kinerja 100%. Target Rasio Kelembagaan/SKPD terhadap penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan Pembangunan tahun 2011 sebesar 93% terealisasi 93% sehingga nilai capaian nya sebesar 100%. Target Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD 25,34%, terealisasi 25,34% dengan demikian nilai capaiannya sebesar 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan adalah sebesar 100%.

g. Pengembangan Telematika dan Informatika

Ada 3 sasaran dalam penyelenggaraan program pengembangan Telematika dan Informatika yaitu: Penerapan norma, standar dan prosedur telematika dan informatika, penerapan layanan telematika dan informatika yang terpadu, aksesibilitas tinggi dan kapasitas mencukupi dan mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dan manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio penyusunan dan sosialisasi aturan perundang-undangan, norma, standar dan prosedur telematika dan informatika, penerapan layanan telematika dan informatika, Rasio Pengembangan Pelayanan Telematika dan informatika yang terpadu dengan pemanfaatan

penggunaan teknologi, Rasio peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan Telematika dan informatika Berdasarkan Indikator tersebut, Rasio penyusunan dan sosialisasi aturan perundang – undangan, norma, standar dan prosedur telematika dan informatika, penerapan layanan telematika dan informatika dari target 26,81 %, terealisasi 26,81 %, dengan demikian capaiannya 100%. Rasio Pengembangan Pelayanan Telematika dan informatika yang terpadu dengan pemanfaatan penggunaan teknologi dari target 17,48% terealisasi 17,48%, dengan demikian capaiannya 100%. Rasio peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan Telematika dan informatika dari target 59,47% terealisasi 59,47%, dengan demikian nilai capaiannya 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja dari 3 indikator kinerja yang digunakan adalah 100%.

h. Peningkatan Kerjasama Pembangunan

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan program ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama pemerintahan dengan indikator kinerja jumlah kesepakatan kerjasama pembangunan dengan pemerintah perbatasan, regional dan bilateral dan sasaran kedua yaitu penggalangan sumber – sumber pendanaan di luar APBD (Non APBD) dan APBN serta sumber – sumber pendapatan lainnya yang sah dengan indikator kinerja Rasio Jumlah kesepakatan diluar Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota yang direalisasikan. Nilai capaian kedua indikator di atas sebesar masing – masing sebesar 100 %, sehingga nilai capaian kinerja program peningkatan kerjasama pembangunan adalah sebesar 100%. Indikator yang digunakan yaitu : Jumlah kesepakatan kerjasama pembangunan dengan pemerintahan perbatasan, Regional dan bilateral dan Rasio Jumlah Kesepakatan diluar pemerintah provinsi dan Kab/Kota yang direalisasikan.

Berdasarkan Indikator Rasio Jumlah kesepakatan kerjasama pembangunan dengan pemerintahan perbatasan, Regional dan bilateral dari target 80% terealisasi 80% dengan

demikian capaiannya 100%. Rasio Jumlah Kesepakatan diluar pemerintah provinsi dan Kab/Kota yang direalisasikan dari target 80% terealisasi 80%, dengan demikian nilai capaiannya 100%. Rata-rata capaiannya 100%.

i. Fasilitas dan Penataan Daerah Otonom Baru

Sasaran program ini adalah fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan daerah otonom baru dan fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah dengan capaian 100% dari target 100%. Indikator yang digunakan rasio koordinasi dan fasilitasi penataan daerah otonom baru.

j. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Pemerintah Daerah

Dua sasaran dari program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan pemerintah daerah adalah pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kab/Kota dan penyusunan pedoman perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pemerintah daerah. Untuk mengukur nilai capaian kinerja kedua sasaran ini, indikator yang digunakan adalah : Jumlah Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota dan Jumlah Dokumen Pedoman Perencanaan Anggaran (ASB, SSH dan Ped.RKA).

Target Jumlah Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota pada tahun 2011 adalah 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen sehingga nilai capaiannya sebesar 100%.Jumlah Dokumen Pedoman Perencanaan Anggaran (ASB, SSH, dan Ped. RKA) yang ditargetkan pada tahun 2011 sejumlah 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen sehingga nilai capaiannya sebesar 100%. Rata – rata nilai capaian program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan pemerintah daerah adalah 100%.

k. Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM

Sasaran program ini adalah sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah, antar pusat, provinsi dan kabupaten/Kota untuk mewujudkan kebutuhan,

perencanaan strategis, dan pelayanan publik. Untuk mengukur sasaran ini indikator yang digunakan adalah jumlah sosialisasi dan desiminasi produk hukum pusat, provinsi dan kabupaten/Kota, target untuk tahun 2011 adalah 75%, dan realisasinya sebesar 75% sehingga nilai capaian kinerja program Peningkatan kesadaran dan pengembangan produk Hukum dan HAM sebesar 100%.

1. Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Ada dua sasaran yang hendak dicapai dalam program ini yaitu peningkatan derajat kepercayaan masyarakat dan kualitas kesadaran hukum masyarakat dan peningkatan kualitas kesadaran hukum dan politik. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Jumlah Gangguan Keamanan terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha (Asumsi Max = 12%) dan Rasio Forum kewaspadaan dini masyarakat dan sosialisasi pemahaman nilai-nilai ideologi bangsa.

Berdasarkan dua indikator kinerja tersebut yaitu Jumlah Gangguan Keamanan terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha (Asumsi Max = 12%) dan Rasio Forum Kewaspadaan dini masyarakat dan sosialisasi pemahaman nilai-nilai ideologi bangsa diperoleh nilai rata-tara capaian kinerja program pendidikan politik masyarakat dan pengembangan wawasan kebangsaan sebesar 100%.

Berdasarkan nilai capaian kinerja 14 program yang diselenggarakan pada agenda pemerintahan diatas, maka rata-rata nilai capaian kinerja agenda pemerintahan adalah sebesar 97,08%.

2. Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kinerja Pemerintahan Provinsi Banten pada agenda pemerintahan, berdasarkan nilai capaian kinerja program-program yang diselenggarakan pada agenda pemerintahan. Program-program tersebut adalah :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran program ini adalah meningkatnya akses prasekolah. Untuk mengukur sasaran ini indikator yang digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, target untuk tahun 2011 adalah 22%, dan realisasinya sebesar 22% sehingga nilai capaian kinerja program ini 100%.

b. WAJAR DIKDAS 9 Tahun dan WAJAR 12 Tahun

Ada 3 sasaran dalam penyelenggaraan program ini yaitu meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMP/MTs/SMPL/Paket B/Wustho), meningkatnya Rata – rata nilai ujian Nasional (UN) tingkat SLPT dan Meningkatnya angkapartisipasi sekolah murni (APM) jenjang SD (termasuk SDLB dan MI). dan untuk mengukur capaian kinerja sasaran di atas, indikator kinerja yang digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMLB/Paket B/Wustho, dan APM Jenjang SD/SDLB/MI/paket A.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/SMPLB/Paket B/Wustho, target tahun 2011 adalah 98,45% dengan realisasi 98,45% sehingga nilai capaiannya 100%. APM jenjang SD/SDLB/MI/Paket A, target tahun 2011 adalah 98% dengan realisasi 98% sehingga nilai capaiannya 100%.Rata – ratanilai capaian kinerja program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah 100%.

c. Pendidikan Menengah

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan program pendidikan menengah yaitu : meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) AMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C. indikator yang digunakan adalah angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C dengan nilai capaian 100%. Sehingga rata – rata nilai capaian kinerja program pendidikan menengah sebesar 100 %.

Berdasarkan tabel diatas, target kinerja untuk angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C sebesar 65,40%, terealisasi 65,40%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2011 mencapai 100%.

d. Pendidikan Tinggi

Sasaran program pendidikan tinggi adalah meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) PT/PTA. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran tersebut indikator yang digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA dengan target 12,25% dan terealisasi 12,25% sehingga nilai capaiannya sebesar 100%. Rata – ratanilai capaian kinerja program ini sebesar 100%.

Berdasarkan indikator di atas , target kinerja untuk angka partisipasi kasar (APK) PT/PTA sebesar 12,25%, terealisasi 12,25%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2011 mencapai 100%.

e. Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Sasaran program pendidikan berkebutuhan khusus yaitu meningkatnya rasio jumlah siswa yang mengikuti pendidikan luar biasa pada tingkat SD, SMP, SMA dan sederajat, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program ini adalah : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/Ula, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho dan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C, rata – rata nilai capaian kinerja program ini sebesar 100%. Berdasarkan Indikator tersebut, target kinerja unttuk angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/ Paket A/ Ula sebesar 98%, terealiasasi 98%. Target kinerja untuk angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho sebesar 98,45%, terealisasi 98,45%. Target kinerja untuk Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C sebesar 65,40%, terealisasi 65,40%. Dengan demikian, rata-rata capaian kinerja tahun 2011 mencapai 100%.

f. Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat

Sasaran program ini adalah meningkatnya minat baca penduduk dan terkelolanya arsip dan dokumen daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah Jumlah

Pengunjung pada TBM, Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling, Rasio Pelayanan Administrasi kearsipan.

Target jumlah pengunjung pada TBM, Perpustakaan, dan perpustakaan keliling pada tahun 2011 adalah sebesar 20%, terealisasi 20% sehingga capaiannya sebesar 100%. Target Rasio Pelayanan Administrasi kearsipan sebesar 20%, terealisasi 20% sehingga nilai capaiannya sebesar 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja program pengembangan perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat sebesar 100%.

g. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Sasaran penyelenggaraan program ini adalah meningkatnya rasio jumlah tenaga pendidik dan kependidikan nonformal yang telah memiliki uji kompetensi dengan target 75% terealisasi 75%, dengan demikian capaian kinerjanya 100%.

Rasio jumlah tenaga pendidik dan kependidikan Non-formal yang telah memiliki uji kompetensi yang ditargetkan pada tahun 2011 adalah 75% terealisasi 75% sehingga nilai capaian 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan sebesar 100%.

h. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan

Sasaran yang hendak dicapai pada program ini yaitu : meningkatnya rasio ketersediaan instrumen pengelolaan pelayanan pendidikan terhadap kebutuhan instrumen keseluruhan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerjanya yaitu : Rasio Ketersediaan Instrumen Pengelolaan Pelayanan Pendidikan terhadap Kebutuhan Instrumen Keseluruhan.

Rasio ketersediaan instrumen pengelolaan pelayanan pendidikan terhadap kebutuhan instrumen keseluruhan yang ditargetkan pada tahun 2011 adalah 100% terealisasi 100% sehingga nilai capaian 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan sebesar 100%.

i. Pendidikan Non Formal, Informal dan Kecakapan hidup

Sasaran program ini adalah menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas, meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/Ula dan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SMP/Mts/SMPLB/Paket B/Wustho. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Angka Buta Aksara Pendudukan berusia 15 Tahun ke atas, Angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A /Ula, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/ Wustho.

Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas ditargetkan 5,15% pada tahun 2011, dan terealisasi 5,15%, sehingga nilai capaiannya 100%. Target angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/ Ula pada tahun 2011 sebesar 98,50% terealisasi sebesar 98,50% sehingga nilai capaiannya sebesar 100%. Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/ Wustho ditargetkan 98,45% terealisasi 98,45% nilai capaian kinerjanya sebesar 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja program pendidikan Non Formal, informal dan kecakapan Hidup sebesar 100%.

j. Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Sasaran program ini adalah meningkatnya organisasi kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kepemimpinan. Untuk mengukur sasaran ini, indikator yang digunakan adalah rasio organisasi kelompok kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kepemimpinan, total 46 organisasi. Target untuk tahun 2011 adalah 78,26%, terealisasi 78,26%, dengan demikian nilai capaian kinerja program peningkatan peran serta kepemudaan sebesar 100%.

Rasio Organisasi Kelompok Kepemudaan yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan Sebanyak 46 Organisasi Kepemudaan yang ditargetkan pada tahun 2011 adalah 78,26% terealisasi 78,26% sehingga nilai capaian 100%. Rata-rata nilai capaian kinerja program

peningkatan manajemen pelayanan pendidikan sebesar 100%.

k. Pengembangan Manajemen, Pembinaan, dan Pemasyarakatan Olahraga

Sasaran program ini adalah terbinanya cabang olahraga yang berprestasi dan meningkatnya kegiatan olahraga di masyarakat serta meningkatnya cabang olahraga yang dibina. Indikator yang digunakan adalah: Rasio terbinanya cabang olahraga yang berprestasi dan meningkatnya kegiatan olahraga di masyarakat serta meningkatnya cabang olahraga yang dibina. Capaian kinerja masing-masing 100%, dengan demikian rata-rata capaian kinerjanya 100%.

3. Agenda Perekonomian

Untuk menilai kinerja pemerintah Provinsi Banten pada agenda perekonomian, kita akan menghitung nilai capaian kinerja Program – Program yang diselenggarakan pada agenda Perekonomian. Program – Program tersebut adalah:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan

Sasaran Program ini adalah terciptanya Kemampuan memanfaatkan ketersediaan Pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang legal dan diterima secara sosial budaya ketersediaannya pangan yang cukup, aman, dan merata. Indikator kinerja yang digunakan adalah: Indek Tingkat Kerentanan Pangan, nilai capaiannya 99,57%, Rasio Pemanfaatan dan Penyerapan Pangan, nilai capaiannya 97,32 %, Rasio Ketersediaan Pangan Daerah, nilai capaiannya 99,59 %, Rasio Akses Pangan dan Pendapatan Masyarakat, nilai capaiannya 98,57%, Tingkat Konsumsi Ikan, nilai capaiannya 100%.

Berdasarkan Tabel di atas, dengan menggunakan lima indikator pengukuran, rata – rata nilai capaian kinerja program peningkatan ketahanan pangan adalah sebesar 99,01%.

b. Pengelolaan dan Pengembangan Agribisnis

Sasaran Program ini adalah Revitalisasi pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan; Keberdayaan Petani Pembudidayaan & Nelayan. Berdasarkan lima indikator yaitu Produksi dan produktivitas hortikultura nilai capaiannya 100%, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan, nilai capaiannya 100% (Target 13,50 % realisasi 13,50%. Peningkatan ekspor perikanan 189,57%. Luas Pengembangan dan rehabilitasi hutan capaian kinerjanya 100%, pengamanan dan pengendalian kawasan hutan dan kebun 100%. rata – rata nilai capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan agribisnis sebesar 117,91%.

c. Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Sasaran program Pengolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan adalah peningkatan pendapatan pembudidayaan dan nelayan. Indikator kinerja yang digunakan adalah: Produksi Perikanan nilai capaian kinerjanya 120,82% (target 168.682 ton realisasi 169.150 ton). Luas Lahan yang Dikonservasi 209,00 %(target 1 ha realisasi 4,18 ha). Penyerapan tenaga kerja capaian kinerjanya 112,50 % (target 90.000 org realisasi 90.000 org). Penyerapan Tenaga Kerja Perikanan capaian kinerja 113,92% (target 79.000 org realisasi 90.000 org). Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya 88,75% (target 110 realisasinya 97,63). Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kelautan dan Perikanan capaian kinerjanya 166,67 (target 12 kasus realisasi 20 kasus).

Berdasarkan enam indikator, rata – rata nilai capaian kinerja program – program pengolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan adalah sebesar 135,28%.

d. Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Hutan

Ada dua sasaran yang hendak dicapai pada program ini yaitu pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan disekitar hutan. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Pembinaan Industri Hasil Kehutanan capaian kinerjanya 100% (target 150 buah realisasi 150 buah. Penertiban dan Peredaran Hasil Hutan (Penataan Hasil

Hutan) capaian kinerjanya 100% (target 8 kab/kota realisasi 8 kab/kota 8 kab/kota. Rehabilitasi hutan dan lahan capaian kinerjanya 175 % (target 12.000 ha realisasi 21.000 ha).

Berdasarkan tiga Indikator kinerja diperoleh rata – rata capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sumberdaya hutan adalah sebesar 125%.

e. Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah

Ada empat sasaran yang hendak dicapai pada program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah yaitu meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Peningkatan pemasaran kebudayaan dan pariwisata, peningkatan kemitraan pariwisata Indikator kinerja yang digunakan adalah : Jumlah Pelaksanan Sosialisasi 100% (target 3 realisasi 3), Jumlah Destinasi Wisata yang Dikembangkan 100 % (target 6 realisasi 6), Jumlah Kemitraan Dengan Usaha Jasa Pariwisata capaian kinerja 100 % (target 2 realisasi 2), Jumlah Pelaksanaan Event/Promosi capaian kinerjanya 100% (target 6 realisasi 6).

Berdasarkan empat indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan pariwisata Daerah adalah sebesar 100%.

f. Peningkatan Investasi Dunia Usaha

Tiga sasaran dalam peyelenggaraan program ini adalah Meningkatnya minat dan realisasi investasi, Meningkatnya minat dan realisasi investasi dan meningkatnya promosi dan kerjasama investasi untuk mendukung minat dan realisasi investasi; memelihara dan fasilitasi investasi. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Peningkatan Volume Perdagangan capaian kinerja 100 % (realisasi 7,00% target 7,00%) Peningkatan Pelayanan Masyarakat capaian kinerjanya 100% (realisasi 9,00 % target 9,00%) Promosi Perdagangan capaian kinerjanya 100% (realisasi 5,5% target 5,5%).

Berdasarkan tiga indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja program peningkatan investasi Dunia Usaha adalah 100%.

g. Peningkatan Hubungan Kemitraan Industri Hulu – Hilir

Ada tiga sasaran pada program Peningkatan Pada Hubungan Kemitraan Industri Hulu-Hilir yaitu Meningkatkan Penerapan dan Pengembangan IPTEK dan Kompetensi industri serta aspek kemasan HAKI bagi IKM; meningkatnya kualitas dan keragaan serta diversifikasi produk-produk IKM ciri khas daerah; Terciptanya iklim yang kondusif terhadap pengembangan klaster industri potensial (TPT, Alas kaki, petrokimia, logam dan mesin) di Provinsi Banten dan Meningkatnya Kualitas dan keragaan serta diversifikasi Produk-Produk IKM ciri khas daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Peningkatan Produktifitas Industri 100% (target 6,50% realisasi 6,50%), Peningkatan Produksi IKM 100% (target 8,00% realisasi 8,00%)

Berdasarkan tiga indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja program Peningkatan Hubungan Kemitraan Industri Hulu – Hilir adalah sebesar 100%.

h. Pengembangan Usaha dan Kelembagaan UMKM-K

Sasaran kegiatan pengembangan dan kelembagaan UMKM-K adalah pengembangan lingkungan usaha; fasilitasi pembiayaan dan pemasaran; pengembangan kewiraan usaha dan SDM dan setara bisnis UMKM. Indikator yang digunakan Pengembangan kewirausahaan dan SDM capaian kinerjanya 100% (target 20,00% realisasi 20,00%) , Pengembangan lingkungan Usaha 100% (target 2,31% realisasi 2,31%), fasilitas Pembiayaan 100% (target 7% realisasi 7%)

Berdasarkan tiga indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan UMKM-K adalah sebesar 100%.

i. Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha

Sasaran dari program ini adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 9,5% pada akhir tahun 2012,

dengan indikator kinerja: Rasio jumlah pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Angkatan kerja, dengan target kinerja 12,77% realisasinya 12,77%, dengan demikian nilai capaian kinerjanya 100%.

Berdasarkan nilai capaian kinerja 9 program yang diselenggarakan pada agenda perekonomian di atas, maka rata-rata nilai capaian kinerja agenda perekonomian adalah sebesar 99,89%.

4. Agenda Pengembangan Kawasan Wilayah

Untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi Banten pada agenda pengembangan kawasan Wilayah, kita akan menghitung nilai capaian kinerja Program-Program yang diselenggarakan pada agenda pengembangan kawasan Wilayah. Program-Program tersebut adalah :

a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas jalan dan jembatan pada kondisi mantap 80-90% (rata-rata pada ruas jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan prioritas penanganan pada kawasan strategis (industri dan pariwisata). Untuk mengukur kinerja program ini, indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio Ruas Jalan & Jembatan Dalam Kondisi Mantap di WKP I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) 100% (target 97,21 realisasi 97,21), Rasio Ruas Jalan & Jembatan Dalam Kondisi Mantap di WKP II (Kab. Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon capaian kinerjanya 100% (target 98,52 realisasi 98,52), Rasio Ruas Jalan & Jembatan Dalam Kondisi Mantap di WKP III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak) capaian kinerja 100% (target 80,08 realisasi 80,08). Sehingga rata-rata nilai capaian program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebesar 100%.

b. Pengembangan Transportasi, Pos dan Telekomunikasi

Ada tiga sasaran dalam penyelenggaraan program pengembangan transportasi, pos dan telekomunikasi yaitu :
(1) Meningkatnya penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan

informatika dengan aksesibilitas serta kapasitas yang memadai (2) Meningkatnya penyelenggaraan transportasi yang terpadu, aman, tertib, ramah lingkungan; (3) Meningkatnya peyediaan fasilitas Transportasi. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peyelenggaraan Transportasi nilai capaian 100%(target 10,55%, realisasi 10,55%), Rasio Pembinaan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi capaian kinerjanya 100%(target 10,53% dan realisasi 10,53%), Rasio Pengembangan Telematika danImformatika capaian kinerja 100% (target 5,6, realisasi 5,6), Rasio Penyediaan Fasilitas Perhubungan Darat capaian kinerjanya 100% (target 8,35% realisasi 8,35%), Rasio Penyediaan Fasilitas Perhubungan Laut capaian kinerjanya 100% (target 3,34 realisasi 3,34), Rasio Penyediaan Fasilitas Perhubungan Udara capaiann kinerjanya 100 % (target 5,01realisasi 5,01). Berdasarkan enam indikator penilaian di atas, rata-rata nilai capaian kinerja program pengembangan transportasi, Pos dan Telekomunikasi adalah sebesar 100%.

c. Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Sumber

Daya Air

Sasaran dalam program ini adalah: (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pengendalian daya rusak. Indikatornya adalah Rasio Perbaikan badan sungai dan SITU di WKP I, II dan III. Target kinerja 68,83% realisasinya 68,83%, dengan demikian nilai capaian kinerja 100%. (2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pendayagunaan air. Indikator kinerjanya adalah Rasio Peningkatan dan Rehabilitas jaringan irigasi teknis di WKP I, II, dan III target kinerja 80,27% realisasi 80,08%. Dengan demikian nilai capaian kinerja 99,76%. Rata-rata nilai capaian kinerja adalah 99,88%.

d. Penataan Perumahan, Permukiman dan Kawasan Sentara Produksi

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman; Meningkatnya

Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Infrastruktur Perumahan dan Permukiman. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi di WKP I, II dan III capaian kinerjanya 100%(target 73,33% realisasi 73,33%). Rasio Pembangunan Gedung Perkantoran di KP3B capaian kinerjanya 100% (target 73,81% realisasi 73,81%). Rasio pembangunan fasilitas perumahan dan pemukiman di WKP I, II, dan III capaian kinerjanya 100% (target 66,67% realisasi 66,67%). Rasio Pembangunan Jalan Akses Pusat Pertumbuhan di WKP I, II dan III capaian kinerjanya 100% (target 80,38% realisasi 80,38%) Berdasarkan empat indikator penilaian di atas, rata-rata nilai capaian kinerja program penataan perumahan, permukiman dan kawasan Sentra produksi adalah sebesar 100%.

e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30% luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan sumberdaya alam adalah sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program ini. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah capaian kinerja 100%, (target 23,50% realisasi 23,50%), Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup capaian kinerjanya 100% (target 25 capaian 25).

Berdasarkan dua indikator penilaian di atas, rata-rata nilai capaian kinerja program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam adalah sebesar 100%.

f. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik (ABM50) dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan

pertambangan merupakan sasaran program ini. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio Dokumen Lingkungan terhadap Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup capaian kinerjanya 100 % (target 8,83% realisasi 8,83%), Rasio Tindak Lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat akibat dugaan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup capaian kinerjanya 100% (target 20,00% realisasi 20,00%), Rasio Pengelolaan Limbah B3 (540 industri) capaian kinerjanya 100% (target 16,67 realisasi 16,67). Rasio Insentif dan Disentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan capaian kinerjanya 100% (target 10,00% realisasi 10,00%), Rasio Insentif dan Disentif terhadap Kegiatan-kegiatan (Pengkajian Dampak Lingkungan capaian kinerjanya 100% (target 10,00% realisasi 10,00%), Rasio Insentif dan Disentif terhadap Kegiatan-kegiatan yang Berpotensi Mencemari Lingkungan (Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat di Bidang lingkungan) capaian kinerjanya 100 % (target 10,00% realisasi 10,00%). Berdasarkan 6(enam) indikator penilain di atas, rata-rata nilai capaian kinerja program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup adalah sebesar 100%.

g. Pengembangan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi

Ada lima sasaran yang hendak dicapai dalam program Pengembangan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi, yaitu :

- 1) Meningkatnya pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan;
- 2) Meningkatnya pengembangan bidang pertambangan dan geologi;
- 3) Meningkatnya pengusaha bidang pertambangan dan energy;
- 4) Meningkatnya pengusaha bidang pertambangan dan energy;

- 5) Ketersediaan sarana prasarana aparaturnya pemerintah yang memadai.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja program ini, indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio Pemanfaatan dan Pengembangan Energy Terbarukan capaian kinerjanya 100% (realisasi 25,77% target 25,77%) Rasio Pemanfaatan dan Pengembangan Migas capaian kinerjanya 100% (realisasi 8,34% target 8,34%) Rasio Pengembangan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten capaian kinerjanya 100% (realisasi 49,91% target 49,91%) Rasio Jumlah Pemetaan Potensi Sumberdaya Mineral, Batubara dan Panas bumi Rasio Jumlah Wilayah Perusahaan Pertambangan yang Terpetakan capaian kinerjanya 100% (realisasi 12,50% target 12,50%) Rasio Pengolahan Air Tanah dan Pemetaan Geologi Tata Lingkungan capaian kinerjanya 100% (realisasi 16,95% target 16,95%) Rasio Jumlah Perusahaan yang Mentaati Peraturan Perundang –Undangan bidang Pertambangan capaian kinerjanya 100% (realisasi 51,90% target 51,90%) Rasio Promosi Produk dan Potensi Pertambangan capaian kinerjanya 100% (realisasi 33,84% target 33,84%) Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana capaian kinerjanya 100% (realisasi 32,32% target 32,32%), dan Pembangunan SKPD capaian kinerjanya 100% (target 17,04% realisasi 17,04%).

Dengan menggunakan 9 (Sembilan) indikator penilaian di atas, rata-rata nilai capaian kinerja program Pengembangan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi adalah sebesar 100%.

h. Penataan Ruang

Sasaran dari Program Penataan ruang di Provinsi Banten tahun 2011 adalah Meningkatnya Fungsi Koordinasi dan Perencanaan Penataan Ruang Daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah: Rasio Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan yang sudah ada terhadap Jumlah

Dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kawasan yang direncanakan) capaian kinerjanya 100% (target 14,28 capaian 14,28) Rasio Realisasi dan Rencana Pada Luas Kawasan Budidaya (Penurunan Menjadi 69,85% sampai Tahun 2029 Menurut RTRWP) capaian kinerjanya 100% (target 81,51% capaian 81,51%), Rasio Jumlah Rekomendasi Gubernur tentang Pengendalian Ruang capaian kinerjanya 100% (target 1 capaian 1)

Target rasio Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan yang sudah ada terhadap jumlah Dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kawasan yang direncanakan) Pada tahun 2011 adalah sebesar 14,28% dengan terealisasi 14,28% sehingga nilai capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan target Rasio Realisasi dan Rencana Pada luas kawasan Budidaya (penurunan menjadi 69,85% sampai tahun 2029 menurut RTRWP) sebesar 81,51% terealisasi 81,51% sehingga nilai capaian kinerjanya 100%. Target Rasio Jumlah Rekomendasi Gubernur tentang Pengendalian 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen. Dengan demikian nilai capaian kinerjanya 100%.

Rata-rata nilai capaian kinerja program penataan ruang adalah sebesar 100%. Berdasarkan nilai capaian kinerja 8 program yang diselenggarakan pada Agenda Pengembangan Kawasan Wilayah di atas, maka rata-rata nilai capaian kinerja Agenda Pengembangan Kawasan Wilayah adalah sebesar 100%.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan

khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional yang bersifat mandatory.

Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Isu penting dan masalah pembangunan daerah di Provinsi Banten tidak terlepas dari isu dan masalah nasional maupun isu eksternal lainnya sebagaimana Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Identifikasi Permasalahan Pembangunan di Provinsi Banten
Tahun 2013

ISU PENTING DAN MASALAH MENDESAK					
NO	TINGKAT NASIONAL	NO	TINGKAT PROVINSI	NO	TINGKAT KAB/KOTA DAN ISU LAINNYA
1	Peningkatan daya saing	1	Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan	1	Isu dan Permasalahan Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten
2	Peningkatan daya tahan ekonomi	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	2	Penyelesaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
3	Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat	3	Kemiskinan Dan Pengangguran	3	Penyelesaian Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota
4	Pemantapan stabilitas sosial politik	4	Pendidikan Dan Kesehatan	4	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		5	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	5	Peningkatan Daya Saing Daerah
				6	Pemilukada Tahun 2013
				7	Penerapan e-KTP
				8	Penegasan Batas Antar Daerah
				9	PNPM Mandiri Perdesaan
				10	Pengeloan Keuangan Daerah

2.3.1 Isu Penting dan Masalah Mendesak Nasional (RKP Tahun 2013)

1. Peningkatan Daya Saing

Tantangan :

- a. Padaakhir tahun 1990-an, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada diatas negara China dan Thailand;
- b. Pada saat ini peringkat daya saing Infrastruktur Indonesia hanya lebih baik dari Filipina dan Vietnam untuk daerah Asia Tenggara;

- c. Dari tahun 2009 hingga 2011 terjadi peningkatan daya saing untuk jalan, kereta api, angkutan udara, telephone dan telephone selular. Akan tetapi secara keseluruhan sektor jalan, pelabuhan, bandara dan ketenagalistrikan masih memiliki daya saing yang rendah.

Tindak lanjut :

- a. Peningkatan iklim investasi dan usaha (*ease of doing bussiness*);
- b. Percepatan pembangunan infrastruktur (*domestic connectivity*);
- c. Meningkatkan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi;
- d. Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda.

2. Peningkatan Daya Tahan Ekonomi

Tantangan :

- a. Bank Duniatelah menyusun *Logistics Performance Index (LPI)* berdasarkan lebih dari 5,000 penilaian oleh lebih dari 1000 profesional logistik dari seluruh dunia. Penilaian dilakukan oleh profesional di luar negeri, yang melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Kuesioner dirancang berdasarkan masukan dari profesional di bidang logistik dan perdagangan. Data Primer dikumpulkan dari 155 negara. LPI mengukur persepsi dari profesional logistik Internasional dan sebaga instrumen sederhana yang berkonsentrasi pada kegiatan logistik ekspor dan impor. Dari hasil survei tersebut pada tahun 2010, Indonesia berada pada posisi ke 75.
- b. Lebih dari separuh daerah irigasi nasional dalam kondisi rusak;
 - 1) 85 % produksi beras nasional berasal dari sawah-sawah beririgasi teknis;
 - 2) 52% produksi beras nasional berasal dari Jawa;
 - 3) Laju konversi sawah beririgasi mencapai 100 ribu ha/tahun terutama di jawa;
 - 4) 68% daerah irigasi nasional berada dalam pengelolaan Pemda.

Tindak lanjut :

- a. Peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton
- b. Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energy.

3. Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat

Tantangan :

- a. Perkembangan IPM Indonesia
 - 1) HDI Indonesia mengalami peningkatan landai;
 - 2) Peningkatan ini merupakan kontribusi peningkatan indeks kesehatan dan pendapatan, serta stabilnya indeks pendidikan;
 - 3) Peringkat Indonesia pada tahun 2011 meningkat satu peringkat dari 125 menjadi 124 dari total 187 negara.
- b. Pencapaian target MDGs masih perlu dukungan penyediaan air baku;
- c. Kapasitas tampung air per kapita Indonesia masih jauh dibanding negara lain.

Tindak lanjut :

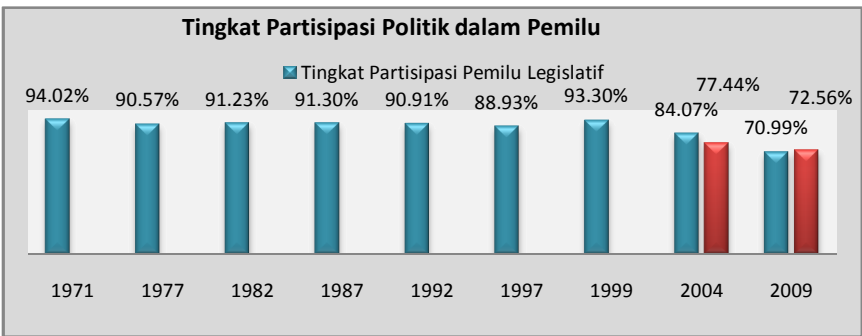
- a. Peningkatan pembangunan sumberdaya manusia;
- e. Percepatan pengurangan kemiskinan dengan mensinergikan klaster 1-4.

4. Pemantapan Stabilitas Sosial Politik

Tantangan :

Tingkat partisipasi pemilih yang semakin menurun sebagaimana Gambar 2.8.

Gambar 2.8
Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilu



Sumber : RKP Tahun 2013

Tindak lanjut :

- a. Persiapan pemilu 2014;
- b. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;
- c. Percepatan pembangunan *minimum essential force*.

2.3.2 Isu Penting dan Masalah Mendesak Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

1. Kabupaten Serang

- a. Terkendalanya pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara;
- b. Percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. Rencana pembangunan TPSA Bojong Menteng yang masih perlu dikaji ulang;
- d. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Agropolitan Waringinkurung dan Kawasan Agropolitan Terpadu Baros;
- e. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Minapolitan Pontang dan Tirtayasa;
- f. Rencana pembangunan Interchange Cikande dan Terminal Tipe A Cikande yang masih tertunda;
- g. Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Karenang, Kragilan dan Ciwandan;
- c. Taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah;
- d. Pengembangan potensi pariwisata terpadu Padarincang, Kawasan Pantai Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang;
- e. Rencana pembangunan Mesjid Terapung Banten di Anyer dan pengembangan/penataan kawasan sekitar pembangunan Mesjid Terapung;
- f. Revitalisasi pasar-pasar tradisional.

2. Kabupaten Pandeglang

- a. Perlunya dukungan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, air bersih dan listrik terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Pulau Umang;
- b. Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pandeglang dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Panimbang;
- c. Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Patia, Sobang, Pagelaran dan Panimbang;

- d. Aspirasi masyarakat agar Pandeglang dijadikan sebagai kawasan pusat pendidikan;
- e. Pengembangan kampung ternak domba di Desa Juhut dijadikan sebagai pusat penelitian ternak domba untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;
- f. Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Sumur dan Panimbang
- g. Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Carita dan Kawasan Wisata Alam serta Wisata Religi;
- h. Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung AKARSARI (deretan Gunung Aseupan-Gunung Karang-Gunung Pulosari) sebagai daerah resapan air;
- i. Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Pandeglang-Lebak;
- j. Perlunya pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya;
- k. Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral;
- g. Revitalisasi pasar-pasar tradisional.

3. Kabupaten Lebak

- a. Perlunya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Malingping;
- b. Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Rangkasbitung dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja;
- c. Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Wanasalam dan Cibinuangan;
- d. Aspirasi masyarakat agar Lebak dijadikan sebagai kawasan perkebunan dengan peremajaan tanaman karet, kelapa sawit, alpokat dan singkong;
- e. Pengembangan kampung ternak kerbau di Desa Narimbang Mulya Kecamatan Rangkasbitung dijadikan sebagai pusat penelitian ternak kerbau untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;
- f. Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kawasan Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Malingping dan Bayah;

- g. Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna dan Bagedur, Kawasan Wisata Alam Arung Jeram Ciberang serta Wisata Religi;
- h. Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai daerah resapan air;
- i. Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Depok- Bogor-Lebak-Pelabuhan Ratu Sukabumi;
- j. Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral;
- k. Percepatan pembangunan bendungan karian di Kecamatan Sajira dengan kapasitas 208.000.000 M³ untuk suplai air baku ke Jakarta, Cilegon, dan Tangerang serta sebagai pengendali banjir sungai ciujung dan konservasi sumber air;
- l. Percepatan pengembangan kawasan industri semen yang didukung potensi pertambangan di bagian selatan, di Kecamatan Bayah;
- m. Penertiban dan pengembangan penambangan batubara, emas dan batu permata kalimaya;
- h. Revitalisasi pasar-pasar tradisional.

4. Kabupaten Tangerang

- a. Rencana pengembangan reklamasi pantai kawasan strategis Tangerang Internasional City;
- b. Revitalisasi Bandara Budiarto Curug sebagai pendukung Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- c. Kondisi kemantapan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten masih relatif rendah;
- d. Percepatan pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II Serpong-Balaraja-Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- e. Coastal Road sepanjang pantai utara untuk mendukung kawasan wisata pantai;
- f. Penanganan banjir tahunan Sungai Cidurian, Sungai Cisadane, Sungai Cimanceuri dan Kali Sabi;
- g. Percepatan pembangunan Terminal Tipe A Bitung;

- h. Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Tangerang khususnya penanganan kemacetan dan drainase;
- i. Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta;
- i. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kronjo.

5. Kota Serang

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Banten Water Front City sebagai wajah Ibukota Provinsi Banten menghadap kelaut;
- b. Percepatan pembangunan Bendungan Sindangheula untuk penyediaan air baku bagi Kawasan Industri Serang-Cilegondan permukiman penduduk.
- c. Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan Tinggi dan Kawasan *Sport City*.
- d. Pelestarian Situs Benda Purbakala dan Masjid Banten Lama;
- e. Revitalisasi Terminal Tipe A Pakupatan, Terminal Angkutan Kota Cipocok dan Kepandean;
- f. Revitalisasi penataan Geometri perempatan jalan perkotaan untuk mengatasi kemacetan;
- g. Revitaliasi penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau Alun-Alun Kota Serang sebagai pusat kegiatan rekreasi dan olahraga masyarakat;
- h. Revitaliasi Drainase kota Serang untuk menangani banjir perkotaan;
- i. Revitalisasi pasar-pasar tradisional;
- j. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kasemen.

6. Kota Cilegon

- a. Percepatan pembangunan ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengatasi kemacetan kearah Kawasan Wisata Anyer, Kawasan Industri Bojonegara dan Pelabuhan Penyeberangan Merak;

- b. Optimasi Pengembangan Kawasan Terminal Terpadu Merak dan percepatan pembangunan Terminal Angkutan Kota Seruni;
- c. Penanganan banjir perkotaan akibat luapan Sungai Cijalupang;
- d. Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya;
- e. Optimasi pengelolaan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f. Mengefektifkan kerjasama pembangunan antar wilayah Serang-Cilegon (Seragon);
- j. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Cilegon.

7. Kota Tangerang

- a. Pengembangan konektivitas transportasi perkotaan untuk memperlancar akses ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
- b. Peningkatan dan pelebaran Jalan Provinsi (ruas jalan Hasyim Ashari, Husein Sastranegara, Cokroaminoto-Raden Fatah, Puri Kembangan-Daan Mogot) untuk mengatasi kemacetan;
- c. Revitalisasi drainase perkotaan untuk menangani banjir tahunan akibat luapan Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Dadap, Sungai Mookervat;
- d. Perlunya pembangunan Jembatan Kedawung yang melintas Sungai Cisadane untuk menghubungkan antara Kota dan Kabupaten Tangerang;
- e. Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta;
- f. Revitalisasi pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Cipondoh termasuk pengembangan Situ Cipondoh;
- k. Optimasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Rawa Kucing.

8. Kota Tangerang Selatan

- a. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD-Serpong-Parung;
- b. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-Ciputat-Simpang Gablek-Sawangan;
- c. Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan perkotaan;
- d. Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan;
- e. Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada persampahan;
- f. Percepatan pembangunan Monorel Tangerang Selatan-Bandara Soekarno-Hatta;
- g. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Setu;
- h. Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- i. Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron;
- j. Kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dimana struktur bangunannya kearah vertikal;
- k. Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional.

2.3.3 Isu Penting dan Masalah Mendesak Lainnya

1. Penyelesaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

- a. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;
- c. Penyediaan data dan informasi yang akurat untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;

- d. Penetapan RKPD tahun 2013 yang tepat waktu, karena berimplikasi pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat dan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Penyelesaian Peraturan Daerah RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota

- a. Percepatan pembahasan Raperda tentang RTRW bagi daerah yang belum memiliki, untuk sinkronisasi struktur dan pola ruang antara RTRW kabupaten/kota dengan provinsi;
- b. Percepatan konsultasi kepada BKPRN untuk sinkronisasi struktur dan pola ruang dalam RTRW Provinsi terhadap kebijakan Penataan Ruang Nasional;
- c. Percepatan proses penyusunan dan persetujuan substansi guna mengatasi permasalahan/konflik pemanfaatan ruang.

3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a. Pelaksanaan sosialisasi pada seluruh jajaran DPRD dan SKPD serta para pemangku kepentingan terkait;
- b. Pembentukan Tim percepatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah;
- c. Fasilitasi kabupaten/kota untuk mengintegrasikan SPM dalam perencanaan dan penganggaran;
- d. Monev penerapan SPM di daerah untuk memastikan pencapaian target SPM di setiap kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

4. Peningkatan Daya Saing Daerah

- a. Pemberian kemudahan dalam berinvestasi;
- b. Peningkatan iklim investasi dan usaha yang kondusif
 - 1) Meneliti dan membatalkan peraturan daerah yang berimplikasi terhadap ekonomi biaya tinggi;
 - 2) Perbaiki peraturan yg menghambat investasi di daerah.
- c. Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai koridor ekonomi
 - 1) Pengerahan alokasi belanja modal APBD dan mendorong para pemangku kepentingan lainnya membangun sarana dan prasarana perhubungan, transportasi, jalan dan jembatan;

- 2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya energi listrik, bahan bakar, dan air.

5. Pemilukada Tahun 2013

- a. Pemilukada yang berkualitas, sehingga akan menciptakan stabilitas sosial dan politik ; keamanan, ketentraman dan ketertiban; serta mencegah munculnya konflik social.
- b. Perintah UU 15/2011 (dukungan Pemerintah Daerah)
 - 1) Penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
 - 2) Penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
 - 3) Pelaksanaan sosialisasi;
 - 4) Kelancaran transportasi pengiriman logistik;
 - 5) Monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 6) Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.
- c. Langkah-langkah Pemerintah Daerah:
 - 1) Perencanaan dan pelaksanaan distribusi logistik sampai ke-TPS tepat jumlah dan waktu.;
 - 2) Perluasan cakupan dan intensitas sosialisasi;
 - 3) Pengerahan perangkat daerah terkait sampai dengan lurah membantu KPU mem-verifikasi data Pemilukada;
 - 4) Peningkatan koordinasi pengamanan penyelenggaraan/pasca Pemilukada.
 - 5) mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan bantuan dan fasilitas penyelenggara Pemilukada, agar terhindar dari permasalahan hukum.

6. Penerapan e-KTP

- a. Manfaat :
 - 1) Mendukung suksesnya Pemilu 2014 dan Pemilukada ;
 - 2) Meningkatkan keamanan negara ;
 - 3) pencegahan terorisme, TKI ilegal, trafficking ;

- 4) Meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan ;
- 5) peningkatan pelayanan publik dalam skala nasional.
- b. Langkah Pemerintah Daerah:

Menyediakan dukungan kelengkapan teknis yang diperlukan di masing-masing kabupaten/kota, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 sehingga taerget penyelesaian program e-KTP dapat selesai tepat pada waktunya.

7. Penegasan Batas Antar Daerah

8. PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM diarahkan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan, dukungan aktivitas perekonomian, dan pendidikan informal maupun kesehatan masyarakat. Ketiga hal tersebut perlu diperkuat dari segi (1) aspek perencanaan, (2) administrasi pelaksanaan kegiatan, (3) pencapaian sasaran (4) keberlanjutan pasca program, dan (5) dukungan alokasi APBD. Hal tersebut dapat meningkatkan dan memperluas kesejahteraan masyarakat guna mengatasi kemiskinan.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Penetapan Perda APBD tepat waktu;
- b. Menekankan agar Belanja Pegawai dapat di bawah 50% dari Belanja APBD;
- c. Mendapatkan status WTP opini BPK hasil audit LKPD .

2.3.4 Isu Penting dan Masalah Mendesak Provinsi Banten Tahun 2013

Berdasarkan isu penting dan masalah mendasak dari tingkat nasional, dari lingkungan eksternal lainnya serta dari kabupaten/kota se-Provinsi Banten maka isu penting dan masalah mendasak di Provinsi Banten Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur Wilayah dan Kawasan

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sangat penting guna menunjang peningkatan perekonomian wilayah dan kawasan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi infrastruktur di Provinsi Banten khususnya kondisi jalan provinsi dan

nasional saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga pada tahun 2013 perlu mendapat perhatian khusus.

Kondisi jalan provinsi pada tahun 2012 sepanjang 770,09 Km, dengan kondisi baik sebesar 42,31% (326,43 Km), kondisi sedang sebesar 28,14% (217,07 Km) dan kondisi rusak sebesar 29,56% atau sepanjang 228,05 Km.

Sedangkan kondisi jaringan jalan nasional tahun 2010 dengan total panjang jalan sepanjang 476,491 Km dengan kondisi baik sepanjang 197,54 Km, sedang 195,25 Km, rusak ringan 51 Km dan rusak berat 31,2 Km.

Penanganan Kondisi Jalan dilakukan melalui pemeliharaan dan peningkatan jalan, peningkatan fungsi jembatan timbang, peningkatan pengendalian pengawasandan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi.

Fokus Penanganan Infrastruktur 2012 diarahkan pada pembangunan jalan menunjang pariwisata, kawasan pusat pertumbuhan, penanganan kemacetan, kawasan pertanian dan pusat pemerintahan.

Penanganan infrastruktur jalan mendukung Pariwisata, antara lain:

- a. Melalui APBD yaitu peningkatan jalan ruas Sumur-Cibaliung, Cigelung Bayah, Tanjung Lesung-Sumur, Kronjo-Mauk-Tanjungkait, Palima-Cinangka-Anyer, dll;
- b. Melalui APBN yaitu peningkatan jalan ruas Labuan-Cibaliung Muarabinuangeun Bayah, Cilegon-Bojonegara dan Cilegon-Pasauran, dll;
- c. Peningkatan jalan Saketi-Malingping.

Penanganan infrastruktur jalan mendukung Kawasan Pusat Pemerintahan antara lain:

- a. Melalui APBD yaitu peningkatan Jalan ruas Serang-Palima-Pakupatan, Bayangkara-Cilaku-Pakupatan-Palima, Serang-Cilaku (pertigaan Petir-KP3B), Lingkar Selatan (Tb Suwandi)-Sayabulu-Serang-Palima;
- b. Melalui APBN yaitu Peningkatan jalan ruas Tol Serang Timur-Sudirman, Serang-Cilegon (Tol Barat Serang), Serang-Pandeglang.

Penanganan infratrakturjalan mengurangi kemacetan Perkotaan, antarlain:

- a. Peningkatan kapasitas jalan seperti: ruas Hasyim Ashari, Ciputat-Pamulang, Abdul Hadi-Fatah Hasan;
- b. Penataan Persimpangan seperti: Sp. Brimob, Wr. Pojok, Sp. Kependean, Sp. Cirendeui dll.

Penanganan infratraktur dasar mendukung Kawasan Pusat Pertumbuhan:

- a. Peningkatan jalan akses pusat pertumbuhan;
- b. Peningkatan dan penyediaan Perumahan dan Permukiman;
- c. Peningkatan dan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan;
- d. Pembangunan Listrik Perdesaan.

Sedangkanpenangananinfrastruktursumberdayaaairgunamengatasibanjir dankekeringan meliputi:

- a. Pembangunan Bendungan Sindang Heula dan Karian;
- b. Penataan dan revitalisasi situ/waduk;
- c. Normalisasi tanggul dan sungai;
- d. Konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

2. Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan. Tingkat permintaan pangan akan terus naik sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ke tahun. Dengan demikian pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas.

Permasalahanyangmuncul dalam pembangunan ketahanan pangan masyarakat adalah:

- a. Rendahnya kualitas ketersediaan input produksi pertanian dan kondisi infrastruktur jalan;
- b. Belum optimalnya produktivitas dan sistem distribusi stok bahan pangan pokok;

- c. Belum terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat;
- d. Belum terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok.

Adapun fenomena yang terjadi dalam rangka pembangunan ketahanan pangan adalah masih tingginya kekurangan pangan di perdesaan pada musim paceklik, terjadinya fluktuasi harga pangan, rendahnya produksi padi, jagung, kedelai, dan gula dan impor bahan pangan yang masih tinggi. Sedangkan tantangan kedepannya adalah diperkirakan konsumsi pangan masyarakat meningkat dan berkurangnya faktor produksi pertanian serta produktivitas lahan yang terus menurun.

3. Kemiskinan dan Pengangguran

Fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat dengan adanya kemiskinan dan pengangguran antara lain pemutusan hubungan kerja yang masih terjadi karena kondisi perekonomian saat ini, maraknya trafficking, anak jalan dan gelandangan.

Tantangan aktual dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran yaitu angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan lapangan kerja yang tersedia, tidak memadainya kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja. Sedangkan ancaman yang dihadapi untuk penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan antara lain Pemberlakuan ACFTA, Perubahan Iklim (*Climate Change*) yang akan banyak berpengaruh kepada masyarakat yang bekerja di bidang pertanian dan kelautan, pekerja migran dan tingkat keterampilan yang lebih baik dari penduduk Provinsi Banten dan tingginya angka putus sekolah.

Peluang yang diharapkan dapat menjadi pemicu dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah adanya program penanggulangan kemiskinan yang selaludigulirkan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bantuan lembaga donor, bantuan lembaga swasta dan usaha, penanggulangan pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan peningkatan daya saing perekonomian.

4. Pendidikan dan Kesehatan

Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Provinsi Banten dilakukan dengan 3 (tiga) Pilar yang terdiri dari aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Hal ini telah sesuai dengan target pencapaian Millennium Development Goals (MDG's) di bidang pendidikan dan kesehatan.

Aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas meliputi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Kedua itu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar. Dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strateginya adalah melalui pengembangan dan pengelolaan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) serta peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Pada aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, yang menjadi fokusnya adalah pada upaya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan.

Permasalahan dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Provinsi Banten adalah minat dan motivasi belajar penduduk 15 th ke atas masih rendah dan angka putus sekolah SD, SMP, dan SMA yang masih tinggi serta keterbatasan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana pendidikan.

Peluang kedepan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan melalui kebijakan Pemerintah daerah menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% serta dukungan dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Di bidang kesehatan berbagai kasus penyakit di Provinsi Banten masih menjadi permasalahan disebabkan oleh kondisi lingkungan yang mendukung terhadap munculnya penyakit dan perilaku masyarakat yang belum menunjukkan kesadaran dalam berperilaku hidup sehat dan

bersih. Penyakit TB paru, penyakit ISPA, HIV/AIDS, demam berdarah dan gigitan serangga serta penyakit kaki gajah (filariasis). Penyebaran penyakit HIV/AIDS baik melalui aktivitas seksual dan penggunaan jarum suntik merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan kesehatan di semua tingkat pemerintahan.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan di puskesmas, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanannya perlu ditingkatkan, demikian pula adanya peningkatan jumlah puskesmas. Selain itu

masalah penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata di setiap daerah menyebabkan terlambatnya penanganan kesehatan di perdesaan. Permasalahan dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Banten diantaranya adalah masih tingginya sebaran penyakit menular di beberapa daerah, angka penyakit degeneratif yang masih tinggi, gangguan kejiwaan meningkat, sarana prasarana dan tenaga pelayanan kesehatan yang belum memadai, tingginya penyalahgunaan NAPZA. Sedangkan fenomena yang terjadi dalam aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebaran penyakit berkorelasi dengan kualitas lingkungan, menjamurnya praktik pengobatan alternatif, penanganan kesehatan bersifat parsial serta pembagian peran antar pemerintah dan swasta belum terstruktur.

Adapun tantangan aktual kedepan yang dihadapi adalah pelayanan kesehatan global, membangun pelayanan kesehatan berkualitas bersama swasta, dan mewujudkan masyarakat yang mandiri kesehatan. Selanjutnya ancaman yang dihadapi dimasa mendatang diperkirakan adalah adanya perubahan iklim (*Climate Change*) sehingga terjadi pemanasan global yang menimbulkan berbagai penyakit, terjadinya mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga mutasi penyakit sangat mudah dan kerusakan lingkungan akibat perilaku masyarakat sehingga membuat lingkungan menjadi tidak sehat.

Namun demikian terdapat peluang untuk

memajukan pembangunan kesehatan, yaitu: peningkatan iptek di bidang kesehatan, memiliki perguruan tinggi yang dapat mencetak sumber daya manusia

kesehatan yang berkualitas, dan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan cita-cita pembentukan Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, agar menjadi Provinsi yang mandiri berdasarkan asas otonomi daerah dengan tujuan mendekatkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada publik/masyarakat di wilayahnya. Sampai saat ini optimalisasi fungsi pemerintahan masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya melalui pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah sesuai dengan sasaran dan target pada agenda pemerintahan yang ditetapkan dalam RPJM-Daerah tahun 2007-2012. Dalam pelaksanaannya diperlukan rencana dan persiapan secara mantap, terukur dan bersinergi antar bidang/ sektor terkait yang melibatkan seluruh unsur/komponen masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Banten, yang didukung perencanaan penganggaran secara detail dan teliti disesuaikan dengan potensi keuangan daerah tahun 2012.

Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, hal-hal yang masih menjadi fokus permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yaitu:

- a. Masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan tentang keseimbangan pola hubungan antar lembaga terutama antara lembaga pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif) dalam penentuan perencanaan dan kebijakan penganggaran pembangunan daerah;
- b. Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan;
- c. Masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai;
- d. Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi atas penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan;

- e. Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat;
- f. Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum optimal.